

**SKRIPSI**

**PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
EFEKTIVITAS PROSES AUDIT**

**STUDI KASUS : INSPEKTORAT KAB. SORONG SELATAN**



Disusun Oleh :

LATIFFAH DINAR

146220121058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**2025**

**PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS  
PROSES AUDIT**

***STUDI KASUS : INSPEKTORAT KAB. SORONG SELATAN***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk ujian skripsi  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
TAHUN 2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS  
PROSES AUDIT  
(STUDI KASUS: INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN)

NAMA : LATIFFAH DINAR

NIM : 146220121058

Telah disetujui oleh tim pembimbing

Pada , November 2025

Pembimbing I



Munzir, S.E., M.Ak

NIDN. 1409039302

Pembimbing II




Musriani, M.M.

NIDN. 1401129801



Sorong,  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora

  
Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.  
NIDN. 1419099401

## HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS  
PROSES AUDIT  
(STUDI KASUS: INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN)**

**NAMA** : Latiffah Dinar  
**NIM** : 146220121058  
**WAKTU PENELITIAN** : 15 Mei 2025 – 26 November 2025

Skripsi ini telah di uji oleh di uji oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 26 November 2025  
Dewan Penguji Skripsi

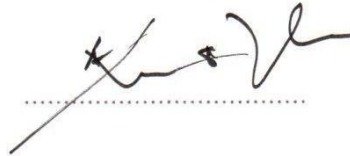
Pembimbing Skripsi



**Munzir, S.E., M.Ak.**  
NIDN. 1409039302

Ketua Penguji

**Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc.**  
NIDN. 1407079001



Anggota Penguji

**Annisa' Khaerani, S. E., M. Acc.**  
NIDN. 1407039501



## HALAMAN PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATIFFAH DINAR

NIM 146220121058

Judul Skripsi : **PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES AUDIT (STUDI KASUS : INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Sorong, 26 November 2025  
Yang membuat pernyataan,



**LATIFFAH DINAR**

**146220121058**

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

“Aku menyerahkan urusanku kepada Allah.” (QS. Ghafir, 40:44)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

“Kesuksesan sejati adalah saat kamu bisa memberi, bukan hanya menerima. Dan selalu bersyukur jangan pernah lupa berbagi.” (Ibunda Penulis)

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada hamba-Nya.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan pintu surgaku. Ayahanda Slamet Maryatin dan Ibunda Tarwiyah. Terima kasih atas segala motivasi dan dukungan yang tidak pernah putus, yang selalu menyelipkan doa-doa baik untuk sebuah kesuksesan penulis. Memberikan cinta dan kasih sayang, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan penulis sampai di titik ini dan menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapatkan gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ayahanda dan ibunda tercinta sampai melihatku berhasil. Penulis persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah dan ibu tercinta. Hiduplah lebih lama.
2. Seluruh keluarga tercinta penulis, terutama kakak laki-laki, adik perempuan penulis, dan bude yang selalu memberikan dukungan, doa, dan menyayangi penulis dengan tulus. Terima kasih atas kehadiran dan cinta tanpa syarat yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini.
3. Teruntuk Sahabat-sahabat tercinta Nur Azisah, Putri Nur Isnaini, dan Intan Darmayanti, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Ucap syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.

4. Kepada kakak kandung dan kakak ipar sekaligus sahabat tercinta, Nur Azisah. Terima kasih telah selalu membuka pintu rumah dan menyediakan tempat tinggal penuh kenyamanan bagi penulis yang jauh dari rumah orang tua. Dukungan dan perhatian kalian menjadi pelindung serta sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dan tak terduga kedatangannya. Terima kasih sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, teman seangkatan 2021 yang selalu hadir dalam suka dan duka. Terima kasih atas canda tawa, kerja sama, dukungan, dan semangat yang tak pernah padam selama proses perkuliahan ini. Kebersamaan kita menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis simpan dalam hat
7. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Latiffah Dinar**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa dan raga yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih aku.

## ABSTRAK

Latiffah Dinar/ 146220121058. **PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES AUDIT (STUDI KASUS: INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. November, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi terhadap efektivitas proses audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan saat ini menjadi penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengawasan. Namun, penerapannya sering kali dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yaitu auditor internal dan pejabat teknis yang terlibat dalam proses audit berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah dimanfaatkan dalam beberapa tahapan audit seperti pengumpulan dokumen, verifikasi data, dan tindak lanjut hasil audit melalui aplikasi pemerintah seperti OM-SPAN, SIPTL, E-Audit, dan SIKAD. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti memberikan kontribusi dalam mempercepat proses audit, meningkatkan keakuratan data, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi hasil audit. Namun demikian, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan internet, akses aplikasi yang terbatas, dan kurangnya pelatihan bagi auditor. Dengan demikian, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi serta pengembangan kompetensi auditor untuk memaksimalkan manfaat teknologi informasi dalam mendukung efektivitas audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan.

**Kata Kunci:** Teknologi Informasi, Efektivitas Audit, Audit Internal, Tata Kelola Digital, Inspektorat

***Abstract:** This study aims to analyze the role of information technology in enhancing the effectiveness of the audit process at the Inspectorate of South Sorong Regency. The utilization of information technology in government oversight is increasingly crucial to improve transparency, accuracy, and efficiency in public financial supervision. However, its implementation often encounters challenges such as limited infrastructure and insufficient digital competency among personnel. This research employed a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, consisting of internal auditors and technical officials involved in technology-based audit activities. The results indicate that information technology has been utilized in several stages of the audit process, including document collection, data verification, and follow-up of audit findings through government applications such as OM-SPAN, SIPTL, E-Audit, and SIKAD. The use of information technology has contributed to accelerating the audit process, improving data accuracy, and strengthening accountability and transparency of audit results. Nevertheless, its effectiveness has not been fully optimized due to various obstacles including unstable internet connection, limited system access, and inadequate training for auditors. Therefore, improvements in technological infrastructure and auditor competency development are needed to maximize the benefits of information technology in supporting the effectiveness of the audit process at the Inspectorate of South Sorong Regency.*

***Keywords:** Information Technology, Audit Effectiveness, Internal Audit, Digital Governance, Inspectorat*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam sebagai rahmatan lil' alamin.

Penelitian ini berjudul **“Peran Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Proses Audit Studi Kasus : Inspektorat Kab. Sorong Selatan”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, arahan, bantuan dorongan dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Bapak Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
3. Ibu Musriani, S.M., M.M. selaku ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Musriani, S.M., M.M selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi.
6. Bapak Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc. selaku Dosen Ketua Penguji, dan Ibu Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Dosen Penguji II, terima kasih telah

memberikan masukan dan kritikan sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi menjadi lebih baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
8. Seluruh Pegawai dan Staff Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
9. Buat rekan seperjuangan Akuntansi Unimuda angkatan 2021 yang selama empat tahun selalu memberikan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Terimakasih buat semuanya, dan sukses buat kita semua, Aamiin. ☺

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, dengan harapan yang besar semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca sekalian. Akhir kata, penulis mengucapkan Terima kasih.

**Penulis,**  
**Sorong, 27 November 2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Teori <i>Task Techonologi Fit</i> (TTF) .....	8
2.2. Kajian Teori .....	9
2.3. Penelitian Terdahulu.....	14
2.4. Kerangka Pikir .....	16
BAB III METODE PENELITIAN .....	18
3.1. Jenis Penelitian.....	18
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	18
3.3. Desain Penelitian.....	19
3.4. Subjek Penelitian.....	20
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6. Instrumen Penelitian.....	22

3.7. Teknik Analisis Data .....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHAN .....	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.2. Hasil Penelitian .....	34
4.3. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP .....	63
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 1 Tabel. Kalender Kegiatan .....	19
Tabel 3. 2 Data Informan .....	22
Tabel 3. 3 Indikator Penelitian .....	23
Tabel 3. 4 Instrumen Penelitian.....	23
Tabel 4. 1 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit.....	34
Tabel 4. 2 Kode Tema Identifikasi Proses Audit.....	36
Tabel 4. 3 Ringkasan Dasar Pelaksanaan Audit .....	40
Tabel 4. 4 Mekanisme Pelaksanaan Audit .....	41
Tabel 4. 5 Kode Tema Pemanfaatan TI dalam proses Audit.....	45
Tabel 4. 6 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Audit .....	50
Tabel 4. 7 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit.....	52
Tabel 4. 8 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit.....	53
Tabel 4. 9 Kendala dalam pemanfaatan TI dalam Audit .....	56
Tabel 4. 10 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit.....	57
Tabel 4. 11 Triangulasi Sumber .....	58
Tabel 4. 12 Triangulasi Metode.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	16
Gambar 3. 1 Desain Penelitian .....	19
Gambar 3. 2. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	25
Gambar 3. 3 Komponen Analisis Data .....	26
Gambar 4. 1 Peran APIP .....	31
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan.....	33
Gambar 4. 3 Peta Kabupaten Sorong Selatan.....	34
Gambar 4. 4 SOP Penyusunan PKPT .....	37
Gambar 4. 5 SOP Pemeriksaan Reguler .....	38
Gambar 4. 6 SOP Pemeriksaan Khusus .....	39
Gambar 4. 7 Contoh LHA.....	44
Gambar 4. 8 Website OM-SPAN .....	46
Gambar 4. 9 Halaman DAK.....	47
Gambar 4. 10 Portal E-AUDIT.....	48
Gambar 4. 11 Halaman SIPTL .....	49
Gambar 4. 12 Halaman SIKAD.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara .....	69
Lampiran 2 Daftar Kode Kategori dan Tema.....	78
Lampiran 3 Open Coding.....	79
Lampiran 4 Axial Coding.....	92
Lampiran 5 PKPT Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan .....	95
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara.....	99

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kemajuan dalam teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada bidang pengawasan dan audit. Teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam administrasi, tetapi juga sebagai aspek krusial dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal audit, pemanfaatan teknologi memungkinkan auditor untuk mendapatkan data dengan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi, sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan secara lebih efisien. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam proses audit telah menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga menyentuh berbagai bidang lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain (Eric Fauzi at all, 2022).

Pengaruh yang dapat dirasakan secara nyata adalah adanya perubahan dalam metode pengendalian, dari yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini menjadi berbasis komputer (Silvia at all, 2021). Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses audit membantu auditor dalam menyusun kertas kerja audit, mendapatkan informasi terkait dengan yang diaudit, mengidentifikasi kecurangan, mempermudah penyimpanan dokumen audit, dan membantu auditor dalam melakukan analisis data (Oktavia, 2015). Dalam era digital saat ini, teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), analisis data besar (*Big Data Analytics*), otomatisasi proses bisnis (*Robotic Process Automation/RPA*), serta teknologi *Blockchain* telah memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi audit internal (Said Saleh, 2024). Audit dilaksanakan untuk menilai dan meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko, pengendalian, serta penting dalam merumuskan tata kelola organisasi agar semakin sesuai dengan kebutuhan (Fitriani at all, 2025).

Fenomena nyata yang mencerminkan penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Sorong Selatan adalah penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.7 yang berbasis daring (Sorongnews, 2025). Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengadakan pelatihan Siskeudes untuk aparatur kampung, termasuk kepala kampung, bendahara, dana pendamping desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan desa agar lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya Siskeudes online ini menandakan pergeseran dari metode tradisional ke sistem digital dalam pengelolaan keuangan publik. Keberadaan Siskeudes secara online diharapkan dapat mempermudah seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana desa secara menyeluruh. Namun, perubahan ini juga memberikan dampak bagi Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan auditor, karena efektivitas proses audit kini sangat bergantung pada seberapa baik teknologi informasi dapat digunakan secara maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi informasi bukan hanya sekedar alat bantu dalam administrasi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan audit yang cepat, tepat, dan transparan.

Keunikan dari penelitian ini berada dalam konteks lokal Sorong Selatan yang masih menghadapi tantangan dalam konteks internet, keterbatasan dalam integrasi sistem, serta perbedaan kemampuan auditor dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Berdasarkan pada berita (Sorongnews, 2023) pegawai kampung di Kabupaten Sorong Selatan sudah mendapatkan pelatihan untuk menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0.7 secara online guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mencapai tingkat kampung, sehingga wajar jika muncul pertanyaan mengenai apakah pemanfaatan teknologi informasi di Inspektorat dapat memberikan efek yang sama terhadap efektivitas audit.

Peran auditor internal merupakan bagian penting dalam sistem pemerintah karena efektivitas fungsi audit internal membantu mengidentifikasi semua risiko kecurangan yang mungkin muncul dalam suatu organisasi (Miryam at all, 2023).

Dalam lingkungan sektor publik, terutama di lembaga pemerintah, keberadaan auditor internal yang terpercaya adalah hal yang sangat penting untuk memastikan semua prosedur dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berfungsi untuk menjamin kualitas, memastikan bahwa setiap aktivitas berlangsung secara efisien, efektif, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Sarwo, 2016).

Penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa peran teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas proses audit dan teknologi informasi merupakan sistem yang saling terhubung yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan, memproses hingga menampilkan data secara elektronik menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penggemarnya (Fauzi at all, 2024). Penerapan teknologi informasi dalam *auditing* sangat memberikan dampak yang signifikan, memberikan peran yang positif bagi kualitas dan proses audit (Maulana Valsafah, 2021). Hasil penelitian (Maulana at all, 2021) menjelaskan bahwa teknologi informasi memberikan peran yang positif bagi kualitas dan proses audit. Dan terdapat kontribusi antara teknologi dengan kualitas audit dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keandalan audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Namun, meskipun penerapan teknologi informasi mulai diimplementasikan dalam proses audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini diakibatkan oleh berbagai masalah, seperti kurangnya kestabilan akses internet, keterbatasan perangkat keras, serta sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi (Udin, 2025). Kondisi geografis dan infrastruktur di daerah yang terbatas juga berkontribusi pada lambatnya proses digitalisasi audit yang seharusnya berjalan dengan baik. Sementara itu, secara teoritis, teknologi informasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit. Di samping itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti penerapan TI di sektor swasta atau di daerah perkotaan yang memiliki infrastruktur yang lebih

baik. Dengan demikian, terdapat kekurangan dalam memahami bagaimana teknologi informasi dapat secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas proses audit di lingkungan inspektorat daerah, terutama di area dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Sorong Selatan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat menjelajahi secara mendalam pengalaman, sudut pandang, dan kendala yang dihadapi auditor saat menggunakan teknologi informasi dalam proses audit. Dengan melaksanakan wawancara mendalam dan melakukan analisis kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan gambaran lengkap tentang situasi nyata di lapangan. Penelitian ini mengacu pada teori *Task Technology Fit* (TTF) yang dikembangkan oleh (Goodhue dan Thompson, 1995), menjelaskan bahwa efektivitas suatu teknologi dipengaruhi oleh sejauh mana kesesuaian antara teknologi yang digunakan dengan tugas yang harus diselesaikan. Dalam konteks audit, TTF digunakan untuk melihat bagaimana teknologi informasi mampu mendukung tugas auditor dalam menghasilkan laporan yang cepat, tepat, dan akurat. Dengan kerangka teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi kesesuaian dan hambatan pemanfaatan TI pada proses audit di Inspektorat.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana peran Teknologi Informasi (TI) dapat mempercepat proses audit, meningkatkan efektivitas proses audit, meningkatkan kualitas temuan, serta membantu auditor dalam menjalankan tugasnya di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan.. Selain itu, tantangan geografis, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah ini sering kali menjadi kendala dalam mengoptimalkan sistem yang berbasis teknologi. Sangat penting untuk menilai dengan seksama bagaimana teknologi informasi bisa tetap memberikan manfaat, meskipun harus menghadapi keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan APIP daerah, serta menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan sistem audit kedepan yang lebih baik dan modern.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran teknologi informasi dalam efektivitas proses audit di Inspektorat Kab. Sorong Selatan?
2. Sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dalam hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Sorong Selatan?

Rumusan masalah ini penulis rancang untuk mengeksplorasi peran teknologi secara komprehensif, mulai dari manfaatnya, keandalannya, hingga solusi untuk pengembangannya.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian biasanya berusaha menjawab permasalahan yang diteliti.

1. Untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam efektivitas proses audit di Inspektorat Kab. Sorong Selatan.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Sorong Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis bagi kantor inspektorat dan instansi pemerintah lainnya dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan keuangan dan operasional.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi pada literatur akademik,

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang audit dan teknologi, khususnya terkait penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit di sektor pemerintah.

- b. Dasar untuk penelitian selanjutnya,

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan pengembangan teknologi informasi dalam bidang audit dan pengawasan internal.

c. Pengembangan teori efektivitas audit.

Memberikan perspektif baru tentang bagaimana teknologi mempengaruhi efektivitas proses audit dalam konteks organisasi sektor publik dan pengembangan kajian tentang implementasi teknologi dalam audit berdasarkan teori *Task Technology Fit* (TTF)

B. Manfaat Praktisi

a. Meningkatkan kinerja kantor inspektorat,

Memberikan rekomendasi berbasis data untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit.

b. Mengambil keputusan yang lebih baik,

Membantu pimpinan kantor inspektorat memahami pentingnya teknologi informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait investasi dan implementasi teknologi informasi dalam audit.

c. Efisiensi Proses audit,

Mendorong perbaikan dalam pelaksanaan audit dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi waktu, biaya, dan kesalahan dalam proses audit.

d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas,

Mendukung terciptanya proses audit yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

e. Panduan bagi instansi lain,

Memberikan gambaran kepada instansi pemerintah atau organisasi lainnya mengenai manfaat dan tantangan penerapan teknologi informasi dalam proses audit, sehingga dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pihak kantor inspektorat tetapi juga bagi instansi pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan negara.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Teori Task Techonologi Fit (TTF)*

Penelitian ini menggunakan Teori Kesesuaian Tugas-Teknologi, *Task Technology Fit* (TTF) adalah kerangka kerja yang menjelaskan sejauh mana teknologi yang digunakan oleh individu atau organisasi sesuai dengan kebutuhan tugas yang harus diselesaikan, ketika kesesuaian ini tercapai, maka kinerja individu atau organisasi akan meningkat. Model Kesesuaian Tugas-Teknologi dikembangkan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi dengan memeriksa kesesuaian teknologi dengan tugas/persyaratan pengguna. Tujuan teori ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi dalam konteks privat dan publik, yang memiliki penjelasan terbatas tentang bagaimana penerimaan teknologi berkontribusi pada kinerja individu maupun organisasi. TTF adalah teori pertama yang bertujuan untuk mengeksplorasi aspek pasca-adopsi pemanfaatan teknologi, tidak seperti penelitian sebelumnya lainnya, yang terutama berfokus pada anteseden penggunaan dan niat (Goodhue & Thompson, 1995).

Dalam penelitian (Pritama at al, 2024), dijelaskan bahwa untuk memahami kecocokan antara tugas teknologi serta untuk menilai keberhasilan penggunaan suatu sistem informasi dan tingkat kepuasan pengguna, maka metode yang cocok digunakan adalah metode *Task Technology Fit* (TTF) Kesesuaian Tugas Teknologi. Dengan menerapkan metode *Task Technology Fit* (TTF), kita dapat mengidentifikasi apakah teknologi yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem informasi.

TTF terdiri dari lima elemen yang menggambarkan model, yaitu; karakteristik tugas, karakteristik teknologi, kesesuaian antar tugas dan teknologi, pemanfaatan teknologi, dan efek terhadap kinerja. Sementara karakteristik tugas dan karakteristik teknologi menunjukkan aspek tertentu dari teknologi dan pemanfaatannya, sementara faktor kesesuaian antara tugas dan

teknologi secara umum menangkap pandangan individu mengenai kecocokan antara tugas dan teknologi (Goodhue & Thompson, 1995).

Model TTF juga memiliki tiga proporsi. **Proporsi pertama**, menyebutkan bahwa evaluasi pengguna terhadap kesesuaian antara tugas dan teknologi ditentukan oleh kualitas tugas dan teknologi itu sendiri. Seberapa efektif suatu sistem dalam membantu individu menyelesaikan rangkaian tugasnya diukur berdasarkan penilaian penggunaan terhadap delapan aspek; kualitas, keterhubungan, wewenang, kesesuaian, ketepatan waktu, keandalan sistem, kemudahan penggunaan/penelitian, dan interaksi dengan pengguna. **Proporsi kedua**, dalam teori ini menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi oleh individu bergantung pada kesesuaian yang dirasakan. **Proporsi ketiga** dari teori ini, menyatakan bahwa penilaian positif terhadap kesesuaian antara tugas dan teknologi bukan hanya memprediksi penggunaan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap kinerja yang dirasakan (hasil pencapaian tugas individu), (Goodhue and Thomas, 1995).

Tujuan penggunaan teori *Task Technology Fit* (TTF) dalam penelitian ini adalah : 1) Mengeksplorasi sejauh mana teknologi informasi audit yang digunakan saat ini untuk mendukung tugas auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, 2) mengidentifikasi kesesuaian antara karakteristik tugas dan teknologi, 3) Mengevaluasi dampak penggunaan teknologi terhadap efektivitas dan efisiensi proses audit, 4) Menggali kendala dan dukungan dalam penerapan teknologi audit.

## 2.2. Kajian Teori

### 2.1.1. Teknologi Informasi dalam Audit

Teknologi Informasi memainkan peran penting dalam audit sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Teknologi ini memungkinkan auditor mengaudit input, proses dan output sistem secara efektif dan efisien.

#### a. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu rangkaian alat, perangkat, dan proses yang dirancang untuk menciptakan, mengelola, menyimpan, serta

memberikan informasi. TI mencakup berbagai aspek teknologi, termasuk komputer, perangkat lunak, sistem database, jaringan internet, dan perangkat keras seperti server dan sistem penyimpanan. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan data yang cepat dan efisien, serta memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi di mana saja dan kapan saja.

Teknologi informasi tidak hanya mencakup perangkat fisik, tetapi juga melibatkan proses dan sistem yang mengatur cara informasi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan. Dalam konteks ini, teknologi informasi juga meliputi praktik manajemen dan pengelolaan data, keamanan informasi, serta pengembangan sistem dan aplikasi yang membantu organisasi dan individu mencapai tujuan mereka (Andi Muh Akbar at All, 2023).

Dengan adanya teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat, secara otomatis suatu organisasi harus menyesuaikan serta mengatasi tantangan yang ada. Bahkan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, organisasi juga mengubah cara dalam mengumpulkan data, memproses, hingga melaporkan informasi keuangan. Dengan adanya perkembangan tersebut akan berdampak pada perubahan proses akuntansi yang akan berpengaruh terhadap proses audit di dalam metode audit seperti pengelolaan dan juga sistem pengendalian dengan metode baru dalam proses audit, (Alya at al, 2021).

#### b. Teknologi Informasi Audit

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan *e-government* dengan mengembangkan berbagai layanan berbasis *web*, seperti *e-procurement*, *e-budgeting*, *e-ktp*, dan *e-audit* (Arman Kamal, 2022). Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, *e-audit* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan, terutama dalam pengumpulan dan pengolahan data (pengujian transaksi) yang diperlukan untuk keperluan audit (Hilman at all, 2021).

*E-audit* adalah salah satu faktor penunjang yang penting untuk meningkatkan kualitas hasil audit, efektivitas dan efisiensi kerja auditor

serta proses pemantauan yang dilakukan melalui *e-audit* dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil dari audit itu sendiri (Hilman at all, 2021).

c. Manfaat Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berfokus pada pengolahan data. Hal ini meliputi berbagai aktivitas, mulai dari pemrosesan, pengambilan, penyusunan, penyimpanan, hingga manipulasi data dalam berbagai cara. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yakni informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta berperan strategis dalam pengambilan keputusan (Cholik, 2021).

Secara mendalam, departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi lebih fokus pada aspek keadilan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat secara umum. Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif, perlu dilakukan komputersasi pemerintah atau *e-government*, serta peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan. Hal ini dikarenakan, penerapan teknologi informasi akan optimal jika para pengguna benar-benar memahami teknologi tersebut. Dengan demikian, sasaran penerapan teknologi informasi dapat tercapai dengan baik, (Cholik, 2021).

Dengan penerapan Teknologi Informasi (TI), pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui implementasi *e-government*, Sistem Informasi Manajemen (SIM), serta transparansi informasi melalui platform digital, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih efisien, efektif, dan responsif, (Rahma at all, 2024)

d. Peran Teknologi Informasi dalam Proses Audit

Pada era informasi saat ini, kebutuhan akan teknologi menjadi sangat krusial, khususnya dalam mendukung aktivitas suatu organisasi. salah satu contoh nyata adalah penerapan teknologi dalam proses audit. (M. Maulana

at al, 2021) menjelaskan bahwa sudah banyak KAP yang menggunakan media elektronik sebagai kertas kerja audit dalam pekerjaannya dengan tujuan untuk mempercepat waktu audit yang diperlukan jika dibandingkan dengan menggunakan media cetak. selain itu, terdapat aplikasi dengan nama *Audit tool and Linked Archive System* (ATLAS) yang dapat digunakan untuk mengaudit perusahaan kecil hingga menengah. Selain itu, terdapat sistem *Cloud Computing* yang memungkinkan auditor dalam mengakses sumber daya atau dari mana saja melalui jaringan internet.

Di era informasi saat ini, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam proses audit. Pada penelitian, (Oktavia 2015) menjelaskan bahwa dalam menjalankan audit, auditor seharusnya tidak hanya memperhatikan pengembangan kemampuan konseptual, tetapi juga perlu fokus pada evaluasi teknik-teknik terkini yang didukung oleh teknologi. Hal ini bertujuan agar fungsi audit dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

### **2.1.2. Efektivitas Proses Audit**

Audit merupakan suatu aktivitas yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan bukti berkaitan dengan informasi untuk menentukan serta menyusun laporan mengenai sejauh mana informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Secara umum, audit dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta dokumen pendukung yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan (Adenisa, 2019).

#### **a. Proses Audit**

Proses audit dilaksanakan oleh auditor, yaitu individu yang memiliki kompetensi dalam melakukan audit dan bersifat independen. Tujuan utama dari audit adalah untuk memverifikasi apakah subjek yang diaudit telah memenuhi regulasi, standar, dan metode yang telah disetujui oleh perusahaan. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003) terdapat 4 tahapan dalam proses audit. yaitu: 1) Merencanakan dan mendesain pendekatan audit, 2) Melaksanakan uji pengendalian, 3) Melaksanakan prosedur analisis

dan rincian saldo, 4) Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit.

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan: 1) Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, 2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya (M. Djazari, 2009). Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas audit adalah aktivitas yang dilakukan untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pengelolaan dan pengendalian yang tepat. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya.

b. Faktor Efektivitas Audit

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Badara at all, 2014) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara manajemen risiko, sistem pengendalian internal yang efektif, pengalaman auditor, kerjasama antara auditor internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan efektivitas audit internal. Penelitian yang dilakukan oleh (Aria at all, 2023) menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses audit pemerintah adalah Kompetensi auditor internal, independensi, dan dukungan manajemen yang dapat memungkinkan proses audit berjalan secara optimal tanpa campur tangan dari pihak manapun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut bekerja secara signifikan dan apabila salah satu dari faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi pada efektivitas proses audit.

Efektivitas audit internal diukur dengan berbagai indikator yang berbeda oleh para ahli di berbagai negara. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan di antara mereka mengenai kerangka pikir terbaik untuk menilai efektivitas audit internal (Saputra at all, 2024). Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap organisasi memiliki ukuran, tujuan, struktur, dan tingkat

kompleksitas yang unik, sehingga praktik pengukuran efektivitasnya pun tidak bisa disamakan (Abdelrahim at all, 2022).

Efektivitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor utama menurut (Abdelrahim at all, 2022) ada lima faktor kunci yang mencakup sepuluh dimensi.

- 1) Karakteristik organisasi audit internal
  - Independensi audit internal
  - Ukuran audit internal
- 2) Hubungan audit internal
  - Hubungan dengan komite audit
  - Dukungan manajemen senior
- 3) Proses audit internal
  - Mengadopsi audit berbasis risiko
  - Mengadopsi program penjaminan dan peningkatan mutu
- 4) Sumber daya audit internal
  - Kompetensi auditor internal
  - Pengalihdayaan audit internal
- 5) Koordinasi dengan penyedia jaminan lainnya
  - Memimpin implementasi jaminan gabungan
  - Koordinasi audit internal dengan auditor eksternal

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS (Tahun)	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1.	Miryam Lonto, Aditya Pandowo (2023)	PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL : EFEK MEDIASI KUALITAS AUDIT	Meneliti, Teknologi informasi terhadap efektivitas audit internal yang di mediasi oleh kualitas audit internal	Meneliti, di Inspektorat se-Sulawesi Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan pendekatan kuantitatif	Semakin tinggi kualitas audit yang disebabkan oleh teknologi informasi akan meningkatkan efektivitas audit internal dalam mencegah <i>fraud</i>

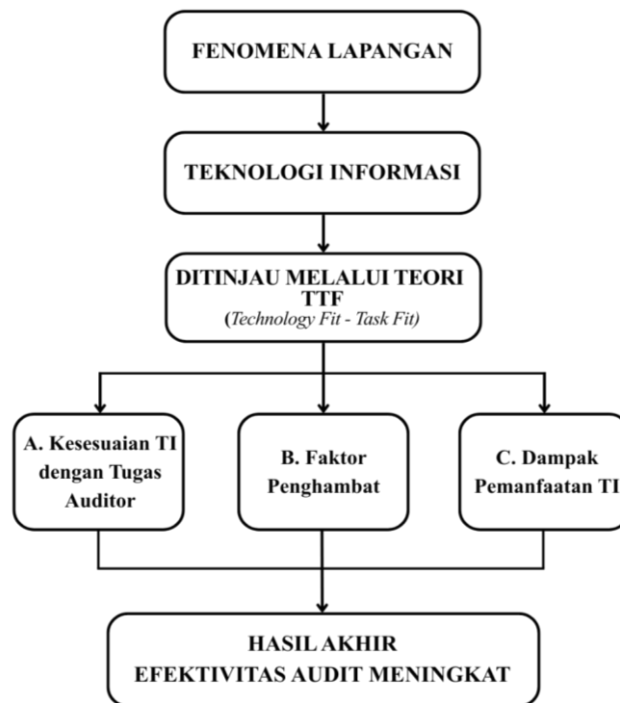
2.	Muhammad Fauzi, Siti Ayu Pramudita Rifda Aliyatul, Sarah Putri, Yuni Sukandani (2024)	DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PROSES AUDIT	Meneliti, Penggunaan teknologi informasi terhadap proses audit dan metode penelitian kualitatif	Meneliti, Dampak penggunaan TI terhadap proses audit pada sebuah perusahaan	Menunjukkan bahwa penerapan TI memberikan dampak peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan, peningkatan pengendalian internal perusahaan dan membantu perusahaan memperoleh informasi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan,
3.	Carina Serly, Zulkarnain (2024)	DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI PROSES AUDIT : TEKNOLOGI INFORMASI	Meneliti, Teknologi informasi terhadap proses audit	Meneliti, Dampak penggunaan teknologi informasi pada pengendalian internal suatu organisasi	Penggunaan teknologi informasi berdampak signifikan pada pengendali internal termasuk otomatisasi proses, peningkatan akurasi, dan manajemen resiko. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, diperlukan penyesuaian metode audit, dan pengendalian, termasuk analisis teknologi, audit berbasis risiko, dan pelatihan keberlanjutan untuk memahami alat-alat baru.
4.	M. Maulana, Irwan Adi, Melly Indrawati, Lusi Ambrawardani, Dhika Maha Putri (2021)	PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENUNJANG KUALITAS DAN PROSES AUDIT DI ERA DIGITAL	Meneliti, Peran teknologi informasi terhadap proses audit menggunakan metode kualitatif	Meneliti, TI dalam menunjang kualitas audit di era digital	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam <i>auditing</i> memberikan dampak yang signifikan dan memberikan peran yang positif bagi kualitas dan proses audit .
5.	Farah Ashma, Balqis Maharani, Dien Noviany (2024)	PENGARUH AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS AUDIT	Meneliti, efek Teknologi informasi terhadap kualitas audit internal, dan apakah teknologi informasi dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi,	Meneliti, beberapa jurnal terlebih dahulu dengan metode SLR. Penulis menyaring dari sumber tersebut sebanyak 50 jurnal yang sesuai dengan topik.	Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi informasi dalam praktik audit untuk meningkatkan kualitas audit. Dan bahwa teknologi informasi dapat memberikan kontribusi ,positif dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keandalan

			efektivitas audit.		audit. Auditor modern perlu memperkaya diri dengan pengetahuan tentang teknologi informasi untuk mengintegrasikan pemahaman tersebut dalam proses audit.
--	--	--	--------------------	--	--

#### 2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran yang memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek dalam penelitian mengenai Peran Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Proses Audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**



Sumber : Peneliti (2025)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan masih banyak dilakukan dengan cara manual, tetapi penggunaan teknologi informasi mulai diterapkan pada tahap verifikasi dan dokumentasi melalui berbagai aplikasi seperti di bawah ini:

- a. **OM-SPAN** : Aplikasi OM-SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) adalah Aplikasi berbasis WEB Kementerian Keuangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran negara secara langsung, termasuk kondisi SPM/SP2D, realisasi anggaran, serka kinerja keuangan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terutama oleh Inspektorat dalam menilai kinerja satuan kerja di daerahnya (KPPN Sorong, 2020).
- b. **SIPD-RI** : merujuk pada penerapan (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia). Sistem ini adalah aplikasi nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengelola informasi pemerintah daerah secara terpusat, transparan, dan akuntabel (Modul SIPD RI, 2024)
- c. **E-Audit** : Aplikasi E - Audit pemerintah adalah sistem informasi pengawasan terintegrasi berbasis elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah. **SIPTL** (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) dan **SIKAD** (Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah) untuk melaporkan kemajuan dalam menangani rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Penggunaan teknologi informasi tersebut dianalisis menggunakan teori Task Technology Fit (TTF), yang mengukur kecocokan antara kemampuan teknologi dan tugas auditor. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat cocok untuk tugas-tugas administratif seperti verifikasi data dan tindak lanjut, meskipun kurang pas untuk pemeriksaan fisik yang masih memerlukan observasi di lapangan. Beberapa kendala seperti jaringan internet, akses yang terbatas, dan kurangnya pelatihan bagi auditor juga berpengaruh terhadap optimalisasi teknologi informasi. Secara keseluruhan, teknologi informasi berpotensi meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam audit, meskipun belum sepenuhnya mendukung semua elemen pemeriksaan dengan baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kasus yang sedang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, mengenai peran Teknologi Informasi (TI) terhadap efektivitas proses audit di Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi dengan lebih mendalam, melalui deskripsi yang rinci mengenai potret kondisi alam. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sesuai dengan keadaan yang ada (Anelda at all, 2023). Menurut (Sugiyono, 2017:13), penelitian kualitatif merupakan metode yang dilaksanakan dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai alat utama, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan berfokus pada pengumpulan serta analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode kualitatif sangat tepat untuk penelitian yang bersifat eksploratif di suatu tempat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berharga (Sugiyono, 2019).

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **3.2.1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, yaitu mulai Desember 2024 hingga Juni 2025. Kegiatan penelitian mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Tabel 3. 1 Tabel. Kalender Kegiatan

Rincian	Kalender Kegiatan							
	Des	Jan	Feb	Mar	Juni	Sep	Okt	Nov
	2024	2025						
Pengajuan Judul								
Penyusunan Proposal								
Bimbingan Revisi								
Seminar Usulan Proposal								
Penelitian Lapangan								
Penyusunan Hasil Penelitian								
Sidang Skripsi								

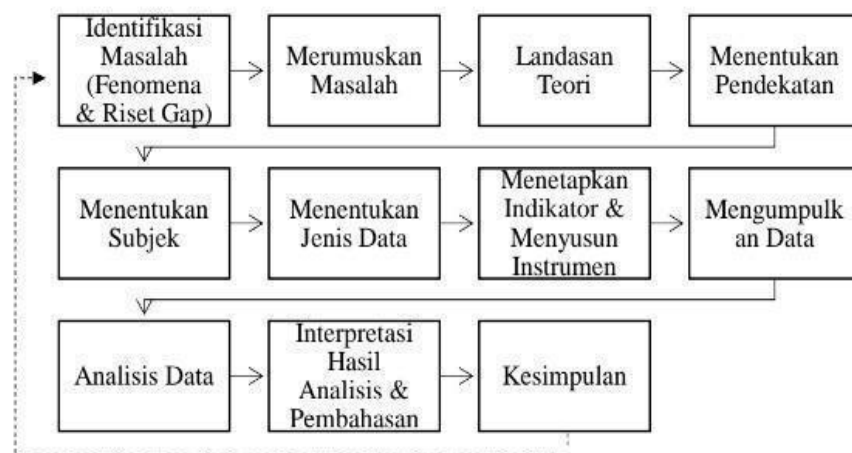
Sumber: Penulis, (2025)

### 3.2.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, yang berlokasi di Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada relevansi institusi tersebut terhadap topik penelitian, yaitu peran teknologi informasi dalam mendukung efektivitas proses audit internal daerah.

### 3.3. Desain Penelitian

Gambar 3. 1 Desain Penelitian



Sumber: Penulis, (2025)

Alur atau tahapan proses penelitian yang sistematis dari awal hingga akhir:

1. Identifikasi Masalah (Fenomena dan Riset GAP), tahap awal untuk menentukan permasalahan penelitian berdasarkan fenomena di lapangan dan celah penelitian (Riset GAP) dari penelitian sebelumnya.
2. Merumuskan Masalah, masalah yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan secara jelas dalam bentuk pertanyaan penelitian.
3. Landasan Teori, Menentukan teori-teori yang relevan sebagai dasar konseptual untuk menganalisis permasalahan penelitian.
4. Menentukan Pendekatan, Menetapkan pendekatan penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
5. Menentukan Subjek, Menentukan siapa yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian.
6. Menentukan Jenis Data, Menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan, seperti data primer dan data skunder.
7. Menetapkan Indikator & Menyusun Instrumen, Menetapkan indikator penelitian dan menyusun alat pengumpulan data, seperti pedoman wawancara atau lembar observasi.
8. Pengumpulan Data, Melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode dan instrumen yang telah ditetapkan.
9. Analisis Data, Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola, makna, dan jawaban atas masalah penelitian.
10. Interpretasi Hasil Analisis & Pembahasan, Menafsirkan hasil analisis dan mengaitkannya dengan teori serta temuan penelitian sebelumnya.
11. Kesimpulan, Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

### **3.4. Subjek Penelitian**

Partisipan dalam penelitian adalah sumber data yang dimanfaatkan dalam kajian. Dalam penelitian kualitatif yang memperoleh data melalui wawancara, partisipan ini disebut sebagai informan, menurut Eko Murdiyanto (2020) Informasi memiliki peran yang krusial dalam menentukan apakah

sebuah penelitian berhasil atau tidak, karena mereka merupakan pemegang informasi dan keberhasilan penelitian sangat tergantung pada data yang disampaikan oleh Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, bukan secara acak. Kriteria yang digunakan antara lain:

- a. Memiliki pengalaman langsung dalam proses audit internal di Kantor Inspektorat.
- b. Terlibat dalam penggunaan teknologi informasi dalam audit (baik sebagai pengguna langsung atau sebagai pengelola sistem).
- c. Memiliki jabatan atau peran strategis yang relevan (auditor, pejabat struktural, staf teknis).
- d. Bersedia menjadi informan dan dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan.
- e. Telah bekerja di Inspektorat minimal 1 tahun (agar memahami sistem kerja secara menyeluruh)

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1. Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi melalui interaksi, yang melibatkan percakapan antara dua orang, yaitu seorang pewawancara yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan seorang informan yang menjawab pertanyaan tersebut, sehingga dapat ditafsirkan penjelasan mengenai suatu topik tertentu, (Eko Murdiyanto, 2020). Teknik wawancara yang diterapkan dalam studi ini ialah wawancara semi terstruktur. Ini berarti bahwa peneliti harus mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini tidak wajib disampaikan secara berurutan dan dapat disesuaikan dengan jalannya percakapan selama wawancara berlangsung (Fadhallah, 2020).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses audit internal di Kantor Inspektorat

Daerah Kabupaten Sorong Selatan, seperti auditor internal (APIP), kepala inspektorat, staf bagian teknologi informasi, serta pegawai lain yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan audit berbasis teknologi informasi.

**Tabel 3. 2 Data Informan**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Informasi</b>
Johan Hehanussa, Se	IRBAN I & Auditor Senior	Proses Audit dan Mekanismenya
Abdullah Ena, S.IP	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan & Penanggung Jawab Aplikasi OM-SPAN	Aplikasi OM-SPAN dan Reviu Laporan DAK Fisik
Philippus Kehek, S.Kom	Staf Sekretaris	Dasar Pelaksanaan Audit dan Keperluan Administrasinya
Dian Budi Sukaca, A.Md.Tek	Kasubag Perencanaan & Penanggung Jawab Aplikasi E-AUDIT	Aplikasi E-AUDIT, SIPDL, SIKAD,

Sumber : Penulis, (2025)

### 3.5.2. Dokumentasi

Berdasarkan Eko Murdiyanto (2020), dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan untuk memperbaiki penelitian, dan sumber datanya dapat berasal dari taks tertulis atau rekaman visual yang memberikan informasi penting untuk proses penelitian. Seperti Dokumen SOP Penyusunan PKPT, SOP Pemeriksaan Reguler, SOP Pemeriksaan Khusus, Laporan Hasil Audit, serta dokumentasi *website* yang digunakan oleh admin inspektorat. Dokumentasi dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana proses audit dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

### 3.6. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), Kualitas data yang dihasilkan dari penelitian dipengaruhi oleh dua faktor utama yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen

penelitian merupakan perangkat yang digunakan dalam pengumpulan data agar proses tersebut bisa berlangsung lebih efisien dan menghasilkan data yang lebih akurat, cermat, komprehensif, serta terstruktur, sehingga lebih gampang untuk diproses dan dianalisis.

Berikut ini adalah indikator yang akan digunakan untuk mengukur peran teknologi informasi terhadap efektivitas proses audit.

**Tabel 3. 3 Indikator Penelitian**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Identifikasi Proses Audit di Inspektorat	Tahapan proses audit
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses audit</li> <li>- Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas audit</li> <li>- Kemampuan auditor dalam memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>- Hambatan dalam penerapan TI pada proses audit</li> <li>- Dampak penggunaan TI terhadap hasil audit dan akuntabilitas kinerja audit</li> </ul>

Sumber: Penulis, 2025

Adapun rancangan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Instrumen Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>
1.	Identifikasi Proses Audit di Inspektorat	Tahapan proses audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tahapan proses audit dilakukan di Inspektorat Kab. Sorong Selatan?</li> <li>2. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan audit?</li> <li>3. Bagaimana koordinasi antara auditor dan instansi yang diaudit?</li> </ol>

2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Audit	Penerapan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknologi informasi apa saja yang digunakan dalam kegiatan audit?</li> <li>2. Pada tahap audit mana saja teknologi informasi digunakan?</li> <li>3. Bagaimana sistem tersebut membantu auditor dalam mengumpulkan dan mengolah data?</li> </ol>
		Penggunaan teknologi dalam meningkatkan efektivitas audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penggunaan teknologi membuat proses audit lebih cepat?</li> <li>2. Bagaimana pengaruh TI terhadap akurasi hasil audit?</li> <li>3. Apakah teknologi membantu mengurangi kesalahan atau duplikasi data?</li> </ol>
		Kemampuan auditor dalam memanfaatkan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kemampuan auditor dalam menggunakan aplikasi audit?</li> <li>2. Bagaimana respon auditor terhadap perubahan sistem dari manual ke digital?</li> <li>3. Apakah pernah ada pelatihan terkait penggunaan TI</li> </ol>
		Hambatan dalam penerapan TI pada proses audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala apa yang sering muncul dalam penggunaan TI?</li> <li>2. Apakah sering terjadi gangguan sistem atau kesulitan teknis?</li> <li>3. Bagaimana respon auditor dan solusi yang biasanya dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?</li> </ol>
		Dampak penggunaan TI terhadap hasil audit dan akuntabilitas kinerja auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penggunaan TI meningkatkan kualitas hasil audit?</li> <li>2. Bagaimana pengaruh TI terhadap akuntabilitas dan transparansi audit?</li> <li>3. Bagaimana tingkat kepuasan auditor terhadap sistem digital?</li> </ol>

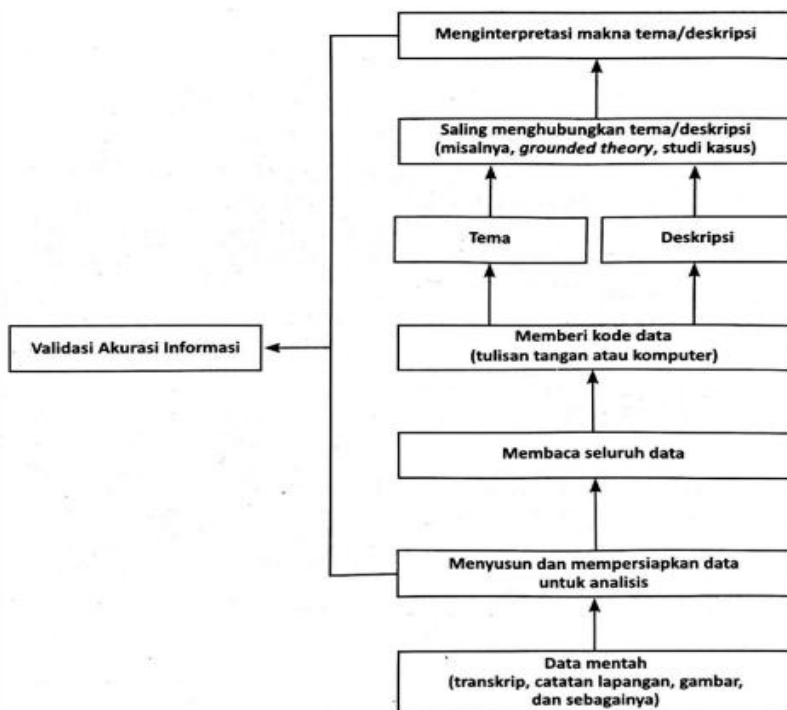
Sumber: Penuli, (2025)

### 3.7. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), analisis data deskriptif diartikan sebagai proses pengorganisasian data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian secara terstruktur, agar informasi yang didapatkan dapat dipahami dan disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang memberikan informasi penting seputar topik yang diteliti, dilanjutkan dengan wawancara dengan informan, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lengkap dan merupakan data yang nyata untuk dianalisis guna menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Gambar 3. 2. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**



Sumber : Creswell, (2014)

Langkah I : Mempersiapkan dan mengorganisasi informasi untuk keperluan analisis. Proses ini meliputi penulisan ulang wawancara, pemindaian dokumen, penggandaan data dari lapangan, atau memilah serta mengkategorikan data sesuai dengan jenis-jenis yang berbeda berdasarkan sumber informasinya.

Langkah II : Mengkaji data secara menyeluruh. Di tahap ini, penulis mengatur informasi dasar dan menjelaskan pengertian mengenai data yang diperoleh secara keseluruhan.

Langkah III : Memulai *coding* semua data. *Coding* adalah proses mengelompokkan data dengan menggabungkan bagian teks atau informasi lain dan menyusun batasan-batasan kategorinya.

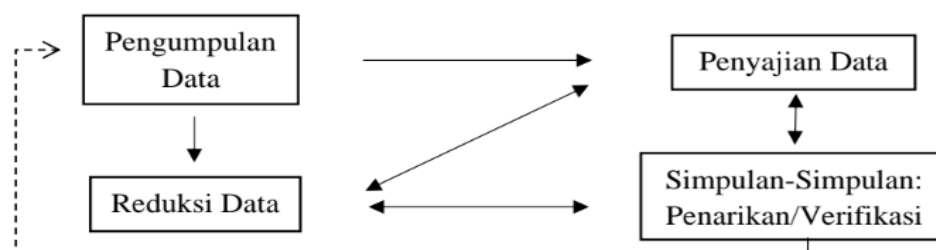
Langkah IV : Terapkan proses *coding* untuk menggambarkan ranah, partisipan, jenis, dan topik yang akan dianalisis. Gambarkan dalam langkah ini melibatkan upaya penguraian informasi secara akurat tentang orang, lokasi, atau situasi dalam lingkungan tertentu.

Langkah V : Tunjukkan bagaimana proses penyajian kembali deskripsi dan tema-tema ini ke dalam narasi atau laporan kualitatif. Dalam menyampaikan hasil analisis, menggunakan pendekatan naratif yang meliputi pembahasan tentang urutan kejadian, tema tertentu secara lengkap, atau tentang hubungan antartema.

Langkah VI: Interpretasi dalam penelitian kualitatif (*Interpretation in Qualitative research*) atau menafsirkan data. Dalam hal ini penelitian memaparkan makna dari suatu pokok gagasan atau pemikiran.

Selain itu, analisis data menurut model Miles dan Huberman (1992) dalam Eko Murdiyanto (2020), dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

**Gambar 3. 3 Komponen Analisis Data**



Sumber : Miles dan Huberman (1992)

- a. Reduksi Data, yaitu tahapan penyaringan, pemfokusan pengamatan, pengikhtisaran, dan pengkonversian data mentah dari lapangan. Dalam tahapan reduksi, penelitian mencari data valid secara akurat dan melakukan konfirmasi data dengan informan lain ketika kebenaran data diragukan.
- b. Penyajian Data, yaitu tahapan penyajian atau penampilan (*display*) data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam tahapan ini, penelitian mengkategorikan data-data yang sejenis ke dalam beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan tema-tema.
- c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi, yaitu tahapan penarikan suatu kesimpulan dari suatu aktivitas atau komposisi yang utuh. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga setiap makna yang didapat dari data dapat dijamin validitasnya guna menunjang terlaksananya tujuan penelitian.

Pada dasarnya, analisis data merupakan proses yang melibatkan persiapan, pengorganisasian, pengelompokan, pemberian kode atau tanda, serta pengklasifikasian data untuk menghasilkan informasi berdasarkan tema atau masalah yang ingin dipecahkan (Eko Murdiyanto, 2020). Agar data yang dianalisis dapat dianggap valid dan akurat, diperlukan pengujian validitas dalam proses analisis data tersebut.

Creswell yang dikutip oleh Eko Murdiyanto (2020), menyatakan bahwa pengujian validitas dalam penelitian kualitatif berbeda dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sehingga validitas di sini tidak memiliki arti yang sama dengan kuantitatif, dan juga tidak sebanding dengan reliabilitas atau generalisasi. Validitas dalam penelitian kualitatif berasal dari sejauh mana hasil penelitian dapat dipahami secara tepat oleh peneliti, peserta, atau pembaca secara umum. Dalam penelitian ini, metode uji validitas yang diterapkan adalah:

**a. Triangulasi**

Triangulasi merupakan suatu metode untuk memverifikasi informasi dari sumber yang berbeda dengan menggunakan metode dan waktu yang tidak sama (Eko Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan:

1. Triangulasi sumber, yakni proses verifikasi data dengan membandingkan informasi yang didapat dari satu informan dengan informan lainnya saat mengumpulkan data melalui wawancara.
2. Triangulasi metode, yakni pengecekan data dengan cara melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dan isi dokumen yang terkait.

**b. Menggunakan bahan referensi**

Bahan referensi adalah tersedianya materi yang mendukung dalam penelitian yang berfungsi untuk menguji informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Eko Murdiyanto, 2020). Untuk penelitian ini, data yang didapat dari wawancara membutuhkan perangkat perekam untuk membantu proses pengumpulan informasi melalui wawancara.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1. Tentang Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah yang bertugas melakukan audit, reviu, monitoring, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Inspektorat mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan, terutama dalam hal **pengambilan data digital, review dokumen online, dan pemanfaatan aplikasi pemerintah seperti SIPD-RI, E-Audit, dan OM-SPAN**. Namun demikian, proses audit inti masih dilakukan secara manual, terutama pada tahapan pemeriksaan dokumen, verifikasi data, dan penyusunan laporan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (pasal 1 uu 23/2014).

##### a. Dasar Hukum

- Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6- Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sorong Selatan Tanggal 25 September 2008

b. Tujuan

Mewujudkan Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.

c. Kedudukan

Sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan.

d. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah.

e. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
4. Perumusan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindakan pidana korupsi
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
7. Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 4. 1 Peran APIP



Sumber : Dokumentasi (2025)

#### 4.1.2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

##### a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN Sorong Selatan Tahun 2025-2024 adalah :

**“SORONG SELATAN MELAJU BERDAYA SAING”**

Dari penjabaran visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan prima, dengan prinsip profesional, transparan, jujur, bersih, bertanggung jawab, dan anti korupsi.

##### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 7 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis sistem meritokrasi;

2. Mengembangkan infrastruktur untuk konektivitas wilayah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kelompok masyarakat adat, keagamaan, perempuan, dan kepemudaan;
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi daerah;
6. Menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;
7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah **Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik berbasis sistem meritokrasi.**

Implementasinya meliputi :

- Penguatan Sistem Pengawasan Internal; Melaksanakan pengawasan berbasis risiko terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif pada seluruh perangkat daerah.
- Penerapan Meritokrasi dalam Pengawasan; Memastikan proses rekrutmen, penempatan, dan promosi aparatur di lingkungan Inspektorat berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dan Memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepegawaian berdasarkan audit dan reuiu.
- Optimalisasi Peran APIP; Meningkatkan kapabilitas APIP menuju level 3-4 sesuai standar BPKP, dan Melaksanakan reuiu, audit, evaluasi, monitoring, dan pendampingan yang mendukung total kelola yang transparan dan akuntabel.
- Penguatan Akuntabilitas KInerja dan Pelayanan Publik; Mengawal pencapaian Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (SIKAP) yang lebih baik, dan Melakukan audit kinerja terhadap program prioritas daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
- Peningkatan Integritas dan Pencegahan Korupsi; Meningkatkan program pencegahan korupsi melalui pengamatan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM, dan Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pendidikan anti korupsi, dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan



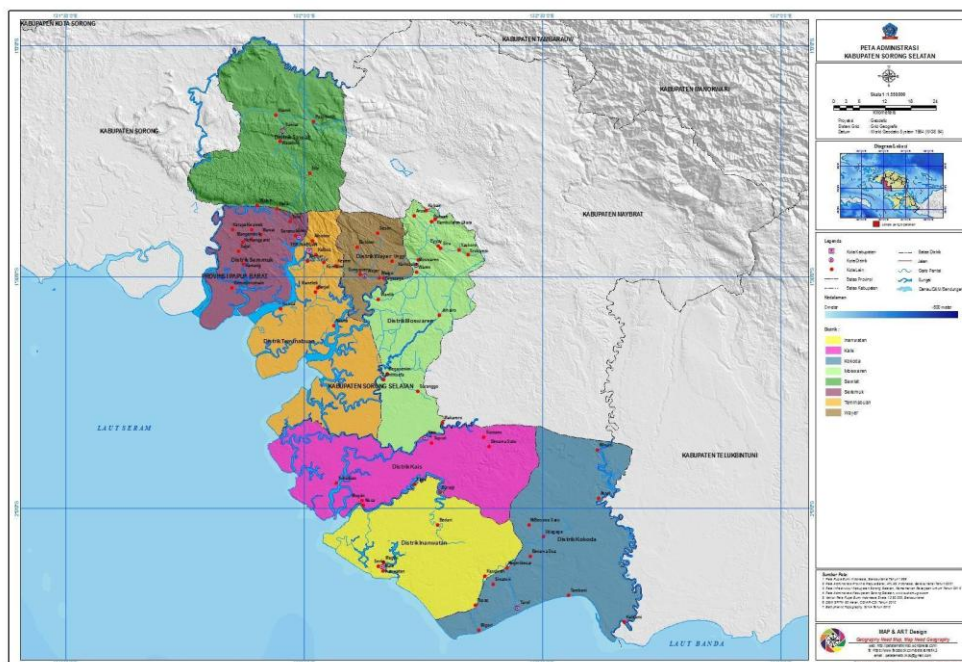
Sumber : Dokumentasi (2025)

#### 4.1.4. Letak Geografis Kabupaten Sorong Selatan

Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 15 Distrik, 121 Kampung dan 2 Kelurahan. Secara administrasi Kabupaten Sorong Selatan berbatasan dengan :

- Utara : Kabupaten Maybrat (Distrik Ayamaru, Aitinyo, dan Mare)
- Selatan : Teluk Bintuni dan Laut Seram
- Timur : Kabupaten Maybrat (Distrik Aitinyo) dan Kabupaten Teluk Bintuni (Distrik Aranday)
- Barat : Laut Seram dan Kabupaten Sorong (Distrik Beraur dan Sayosa)

Gambar 4. 3 Peta Kabupaten Sorong Selatan



Sumber : Dokumentasi, (2025)

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Pengaruh TI terhadap Efektivitas Proses Audit

Tabel 4. 1 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit

Kategori	Kode Kategori	Tema	Kode Tema
Pengaruh Teknologi Informasi	KS6	Pengaruh TI dalam Proses Audit	K3

Sumber : Olah Data, (2025)

Secara umum, teknologi informasi mempercepat, merapikan, dan mempermudah proses audit. Berdasarkan wawancara, staf di Inspektorat menyatakan bahwa aplikasi seperti OM-SPAN, SIPD-RI, SIPTL, dan SIKAD menghilangkan kebutuhan untuk mencari dokumen secara manual atau membawa berkas berat setiap kali melakukan pemeriksaan. Contohnya, dalam pengecekan DAK, AE2 menjelaskan bahwa “*semua dokumen sudah ada di OM-SPAN... tinggal mencocokkan angkanya,*” (AE2, KS6, K3) sehingga proses menjadi jauh lebih cepat karena data sudah ada tersedia dalam sistem.

Teknologi juga memudahkan auditor untuk menemukan **kesalahan atau ketidakesesuaian data**. Ketika terdapat data yang tidak sesuai, auditor dapat langsung memeriksa melalui aplikasi dan meminta OPD untuk melakukan perbaikan. Yang menunjukkan bahwa teknologi informasi berkontribusi dalam memastikan akurasi hasil pemeriksaan. Selain itu, Teknologi informasi secara signifikan **mengurangi beban administrasi** yang sebelumnya dilakukan secara manual. Saat ini, mayoritas dokumen telah diubah menjadi format digital, sehingga auditor dapat bekerja dengan lebih ringan. Tidak hanya saat pemeriksaan, teknologi juga **memudahkan proses tindak lanjut**. Melalui aplikasi seperti SIPTL, auditor dapat mengunggah bukti tindak lanjut dari rekomendasi BPK. BS4 menjelaskan bahwa: *“di SIPTL kita bisa mengupload semuanya... kemudian diverifikasi oleh BPK,”* (BS4, KS6, K3) yang berarti proses pelaporan tindak lanjut menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau.

Meskipun demikian, TI masih belum mendukung seluruh aspek audit. Beberapa langkah masih memerlukan penanganan manual, seperti pengecekan fisik atau analisis beberapa dokumen tertentu. Selain itu, masalah jaringan terkadang menghambat proses pengunggahan atau akses aplikasi. Secara keseluruhan, teknologi informasi memberikan dampak positif yang cukup signifikan: audit menjadi lebih cepat, lebih tepat, lebih ringan, dan lebih transparan. Namun, karena belum semua tahap dapat didigitalisasi, dampak TI terhadap efektivitas audit masih belum sepenuhnya maksimal.

#### **4.2.2. Peran Teknologi Informasi dalam Efektivitas Proses Audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan**

Sebelum melihat sejauh mana peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pemeriksaan, penting untuk memahami cara umum pelaksanaan audit yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan. Penjelasan mengenai proses audit, langkah-langkah yang diambil auditor, serta prosedur pemeriksaan yang berlaku akan memberikan pemahaman yang mendalam untuk menentukan area mana yang didukung oleh teknologi informasi. Dengan demikian, pada

bagian selanjutnya akan disajikan identifikasi proses audit sebagaimana yang dikerjakan oleh auditor di lapangan.

#### 4.2.3. Identifikasi Proses Audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan masih menggunakan metode yang sangat terstruktur dan berbasis manual. Seluruh informan memberikan perspektif yang sama mengenai langkah-langkah terkait tahapan audit, dimulai dari PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang disusun oleh Subbag Perencanaan.

**Tabel 4. 2 Kode Tema Identifikasi Proses Audit**

Kategori	Kode Kategori	Tema	Kode Tema
Dasar Pelaksanaan Audit	KS1	Identifikasi Proses Audit	K1
Proses Pelaksanaan Audit	KS2		

Sumber : Olah Data, (2025).

##### a. Dasar Pelaksanaan Audit

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan berlandaskan beberapa dasar utama yang menjadi pijakan formal maupun operasional dalam proses pengawasan. Tahap awal dari audit diawali dengan penyusunan **Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**. PKPT disusun oleh Subbag Perencanaan setiap akhir tahun anggaran dan menjadi pedoman utama bagi seluruh aktivitas audit di tahun berikutnya.

Hal ini ditegaskan oleh JH1 :

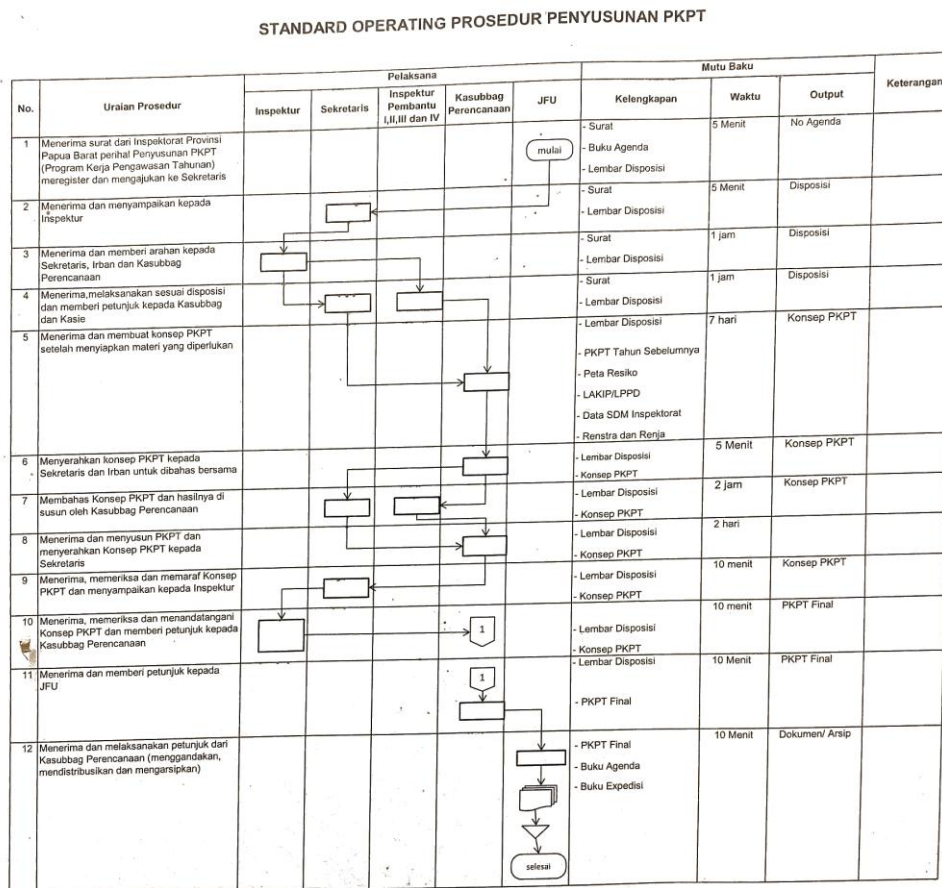
*“Tahapan proses audit nya, pertama itu mulai dari PKPT yang sudah disusun sebelum berakhirnya tahun anggaran kita selama satu tahun, PKPT itu yang menjadi acuan.” (JH1, KS1, K1)*

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh PK3 :

*“Tahapan audit itu tetap merujuk pada PKPT.... PKPT ini menjadi dasar pemeriksaan kita” (PK3, KS1, K1)*

Dengan demikian, seluruh kegiatan audit berawal dari dokumen PKPT, mulai dari menentukan objek pemeriksaan, jadwal audit, dan pembagian tugas antar IRBAN, sehingga seluruh kegiatan auditi selalu dimulai dari dokumen tersebut. Didukung dengan dokumentasi SOP Penyusunan PKPT dibawah ini.

**Gambar 4. 4 SOP Penyusunan PKPT**



Sesno, 06 Februari 2017  
 PIB. KEPALA INSPEKTORAT  
 ITD  
 ZADRAK KAMBUAYA, S.Sos, M.Si  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 19611124 198503 1 011

Sumber : Dokumentasi, (2025)

Selain PKPT, audit juga dapat dilaksanakan berdasarkan **perintah langsung dari Bupati**, baik secara lisan maupun tertulis. Penugasan ini dilakukan apabila terdapat isu atau kebutuhan mendesak di perangkat daerah.

Informan PK3 menjelaskan bahwa selain mengacu pada PKPT:  
*“Inspektorat juga diperintahkan langsung oleh Bupati... lisan maupun tertulis.”*  
 (PK3, KSI, K1)

Hal ini menunjukkan bahwa audit bersifat fleksibel dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila ada: 1) Permintaan khusus bupati, 2) Isu strategis yang harus ditangani segera, dan 3) Kasus tertentu yang perlu penanganan cepat. Adapun Alur Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus

**Gambar 4. 5 SOP Pemeriksaan Reguler**

**STANDARD OPERATING PROSEDUR**  
PEMERIKSAAN REGULER

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Irbn	Tim Pemeriksa	Obrik	Sub. Bag. Evaluasi &	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan	Waktu ( Menit )	Output	
1	Berdasarkan PKPT, Irbn dengan Pengendali Teknis membahas Tim yang akan diugaskan	mulai						PKPT	30	Rencana Pengusasan	
2	Ketua Tim Pemeriksa menyusun konsep ST, Anggaran Waktu dan Kartu Pengusasan						Rencana Pengusasan			Draf ST, Anggaran Waktu dan kartu Pengusasan	
3	Pengendali Teknis mereviu konsep ST, Anggaran Waktu dan Kartu Pengusasan						Adanya SPT, bahan dan anggota Tim		120	Adanya pembagian tugas yang jelas	
4	Sub Bag Evaluasi dan pelaporan melakukan verifikasi kesesuaian dengan PKPT										
5	Inspektur menandatangani Surat Tugas										
6	Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemeriksaan.						Adanya bahan, peralatan dan sistem		660	Tersedianya bahan dan data data obrik	
7	Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP)						Adanya data data obrik yang jelas		150	Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan	
8	Melakukan survey pendahuluan (Permintaan data yang mencakup aspek: Tugaskas, SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana)						Adanya bahan, peralatan dan sistem pengumpulan data		660	Tersedianya bahan dan data data obrik	
9	Melakukan pengujian terhadap data-data.						Tersedianya aliran aturan yang diperlukan		150	Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik	
10	Menyimpulkan hasil pengujian oleh Tim.						Tersedianya bahan dan data data yang telah		120	Adanya kesimpulan awal terhadap obrik	
11	Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dengan menggunakan ICQ (Internal Control Questionnaire) / Flow Chart / Rikarsa						Tersedianya aliran aturan yang diperlukan		120	Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik	
12	Menyimpulkan hasil pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) oleh masing-masing anggota tim.						Adanya dokumen pemeriksaan		150	Tersedia KKP	
13	Tim Pemeriksa mereviu hasil pengujian						Adanya dokumen pemeriksaan yang		330	Adanya KKP yang sudah direviu	
14	Melakukan pemeriksaan lanjutan/pengujian substantive.						Adanya catatan catatan yang perlu dikonfirmasi		330	Adanya catatan catatan dan penjelasan terkait dengan hal yang dikonfirmasi	
15	Melakukan pengumpulan hasil pemeriksaan dari masing-masing anggota tim dan menuangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)						Adanya KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dari masing masing		240	Tersedianya KKP dari masing masing anggota Tim	
16	Melakukan pemberkasan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dari masing-masing anggota tim.						Adanya KKP dari masing masing		240	Tersusunnya bahan bahan untuk NHP	
17	Menyusun draf Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)						Tersedianya bahan dan data data KKP		660	Tersedianya Draf NHP	
18	Mereviu hasil Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)						Adanya Draf NHP dan Peraturan yang		330	Adanya catatan catatan terhadap Draf NHP	
19	Menetapkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)						Adanya Draf NHP yang sudah direviu		330	Tersedia NHP	
20	Melakukan konfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ke obrik.						Adanya NHP dan data data yang diperlukan		330	Adanya tanggapan atau konfirmasi dari obrik	
21	Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dari obrik.						Adanya NHP yang disampaikan oleh Tim		660	Adanya tanggapan tertulis dari obrik	
22	Menyusun draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)						Adanya NHP yang sudah dikonfirmasi		330	Tersusunnya Draf LHP	
23	Mereviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)						Adanya Draf LHP dan data data yang		330	Adanya LHP yang sudah direviu	
24	Melakukan Penetapan dan penomoran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)						LHP Final		330	LHP yang sudah ditanda tangani Inspektur	
									6600		

Senin, 06 Februari 2017  
 Ptl. KEPALA INSPEKTORAT  
 TID  
 TADRAK KAMBUJATA, S.Sos, M.Si  
 PENBINA Tk. I  
 NIP. 19611124 198603 1 011

Sumber : Dokumentasi, (2025)

Gambar 4. 6 SOP Pemeriksaan Khusus

STANDARD OPERATING PROSEDUR PEMERIKSAAN KHUSUS											
No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Iban	Tim Pemeriksa	Obrok	Sub. Bag. Evaluasi &	Sekretaris	Inspektur	Penyeratan	Waktu (Menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MULAI									
1	Berdasarkan PKPT Iban membahas dengan Dahis merencanakan Tim yang akan ditugaskan							Adanya Surat Perintah Tugas (SPT)	30	SPT yang sudah ditanda tangani	
2	Kelua Tim Pemeriksa menyusun n Konsep ST, Anggaran Waktu, dan Kartu Penugasan										
3	Mengadakan rapat pembagian tugas anggota tim							Adanya SPT, bahan dan anggota Tim	120	Adanya pembagian tugas yang jelas	
4	Mengumpulkan data -data yang berkaitan dengan pemeriksaan.							Adanya bahan, peralatan dan sistem pengumpulan data	660	Tersedia bahan dan data data obrok	
5	Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP)							Adanya data data obrok yang jelas	150	Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan	
6	Melakukan survey pendahuluan (Permintaan data yang mencakup aspek: Topoksi, SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana)							Adanya bahan, peralatan dan sistem pengumpulan data	660	Terkumpulnya bahan dan data data obrok	
7	Melakukan pengujian terhadap data data							Tersedia aluran aluran yang diperlukan	150	Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrok	
8	Menyimpulkan hasil pengujian oleh Tim							Tersedia bahan dan data data yang telah diuji	120	Adanya kesimpulan awal terhadap obrok	
9	Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dengan menggunakan ICQ (Internal Control Questioner)/Flow Chart /Narsis							Tersedia aluran aluran yang diperlukan	120	Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrok	
10	Menyimpulkan hasil pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) oleh masing-masing anggota tim.							Adanya dokumen pemeriksaan	150	Terbitnya KKP	
11	Tim Pemeriksa merevisi hasil pengujian.							Adanya dokumen pemeriksaan yang sudah diuji	330	Adanya KKP yang sudah direvisi	
12	Melakukan pemeriksaan lanjutan/pengujian substantif.							Adanya catatan catatan yang perlu dikonfirmasi	330	Adanya catatan catatan dan penjelasan terkait dengan hal yang dikonfirmasi	
13	Melakukan pengumpulan hasil pemeriksaan dari masing-masing anggota tim dan menyusun dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)							Adanya KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan masing masing anggota Tim	240	Terkumpulnya KKP dari masing masing anggota Tim	
14	Melakukan perbincangan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan masing-masing anggota tim.							Adanya KKP dan masing masing anggota	240	Tersusunnya bahan bahan untuk NHP	
15	Menyusun draft Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)							Tersedia bahan dan data data KKP	660	Tersedia Draft NHP	
16	Meriviu hasil Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)							Adanya Draft NHP dan Peraturan yang diperlukan	330	Adanya catatan catatan terhadap Draft NHP	
17	Menetapkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)							Adanya Draft NHP yang sudah direvisi	330	Terbitnya NHP	
18	Melakukan konfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ke obrok							Adanya NHP dan data data yang diperlukan	330	Adanya tanggapan atau konfirmasi dari obrok	
19	Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dari obrok.							Adanya NHP yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa	660	Adanya tanggapan tertulis dari obrok	
20	Menyusun draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)							Adanya NHP yang sudah dikonfirmasi	330	Tersusunnya Draft LHP	
21	Meriviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)							Adanya Draft LHP dan data data yang diperlukan	330	Adanya LHP yang sudah direvisi	
22	Melakukan Penetapan dan penomoran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)							LHP Final	330	LHP yang sudah ditanda tangani Inspektur	
									6600		

Sumber : Dokumentasi, (2025)

Dasar berikutnya adalah **tindak lanjut pemeriksaan lembaga eksternal**, yaitu BPK dan BPKP. Penugasan jenis ini muncul apabila terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

PK3 menyampaikan bahwa :

*“.....Ada juga tindak lanjut dari pemeriksaan-pemeriksaan BPK,BPKP”*

*(PK3, KSI, K1)*

yang berarti proses audit dilakukan untuk memastikan rekomendasi telah dipenuhi oleh perangkat daerah. Dengan demikian, sebagian audit dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap hasil pemeriksaan eksternal.

Secara operasional, dasar-dasar tersebut kemudian dituangkan dalam **Instruksi Pimpinan dan Surat Tugas** yang diberikan kepada IRBAN (Inspektur Pembantu) untuk melaksanakan audit.

JH1 memaparkan bahwa setelah PKPT atau perintah khusus ditetapkan

*“Selanjutnya diarahkan kepada tim lewat instruksi pimpinan ..... bagian perencanaan menyiapkan tugas ... dan tim IRBAN membuat surat ke OPD untuk melaporkan dokumen apa saja yang diperlukan” (JH1, KSI, K1)*

Surat tugas menjadi tanda formal dimulainya audit dan memuat rincian objek audit, waktu pelaksanaan, serta auditor yang ditugaskan.

**Tabel 4. 3 Ringkasan Dasar Pelaksanaan Audit**

<b>Dasar Audit</b>	<b>Sumber</b>	<b>Kutipan</b>
PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Dokumen wajib tahunan	<i>“Mengacu pada PKPT... menjadi dasar pemeriksaan” – PK3</i>
Perintah Bupati	Penugasan lanjutan	<i>“Diperintahkan langsung oleh Bupati....” – PK3</i>
Tindak Lanjut Temuan BPK/BPKP	Pemeriksaan lanjutan	<i>“Ada juga tindak lanjut dari BPK/BPKP”. –PK3</i>
Instruksi Pimpinan & Surat Tugas	Administrasi audit	<i>“Diarahkan kepada tim lewat instruksi pimpinan”. —JH1</i>

Sumber : Olah Data, (2025)

Dengan demikian, berdasarkan data wawancara, dapat disimpulkan bahwa dasar pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan mencakup empat elemen penting, yaitu: PKPT sebagai acuan utama, perintah Bupati untuk tugas

non-rutin, tindak lanjut pemeriksaan BPK/BPKP, serta instruksi pimpinan yang dituangkan dalam surat tugas. Keempat dasar ini bekerja saling melengkapi, sehingga memastikan bahwa proses audit dilaksanakan secara terencana namun tetap fleksibel dalam merespon kebutuhan pengawasan daerah.

#### b. Proses Pelaksanaan Audit

Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Setelah dasar audit ditentukan melalui PKPT, perintah arahan Bupati, atau tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, pimpinan Inspektorat memberikan arahan resmi kepada IRBAN untuk membentuk kelompok audit. Kelompok ini dibentuk sesuai dengan objek audit yang tercantum dalam PKPT atau berdasarkan permintaan khusus. Tahapan proses pelaksanaan audit ini merupakan pondasi awal sebelum pelaksanaan audit dimulai.

**Tabel 4. 4 Mekanisme Pelaksanaan Audit**

<b>Tahapan</b>	<b>Kegiatan Utama</b>
Perencanaan	Penyusunan PKPT, penetapan objek audit, pembentukan tim oleh IRBAN
Persiapan	Pembentukan surat tugas, pengiriman surat permintaan dokumen, permintaan kelengkapan bukti
Pengumpulan Dokumen	OPM menyerahkan dokumen, auditor mengumpulkan dan menginventarisasi, permintaan perbaikan
Pemeriksaan Dokumen	Pemeriksaan manual, verifikasi fisik, pencocokan data, penggunaan aplikasi (OM-SPAN/SIPD/E-AUDIT)
Klarifikasi	Permintaan penjelasan kepada OPD, revisi dokumen, verifikasi lanjutan
Penyusunan Temuan	Pengolahan hasil pemeriksaan, identifikasi ketidaksesuaian, perumusan rekomendasi
Pelaporan	Penyusunan LHA, penyerahan laporan, penyampaian rekomendasi, tindak lanjut OPD

Sumber : Olah Data, (2025)

Proses pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan diawali dengan tahapan **perencanaan** yang melibatkan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan objek, jadwal, dan jenis audit yang akan berlangsung sepanjang tahun anggaran. Hal ini di perjelas oleh informan PK3 yang menyatakan bahwa:

*“tahapan audit itu tetap merujuk pada PKPT yang disusun oleh Subbag Perencanaan... PKPT menjadi dasar pemeriksaan kita.” (PK3, KS2, K1)*

Pernyataan ini juga diperkuat oleh informan JH1 yang mengungkapkan bahwa:

*“tahapan proses audit... pertama itu mulai dari PKPT yang disusun sebelum berakhirnya anggaran tahunan,” (JH1, KS2, K1)*

Selain PKPT, audit juga dapat dilaksanakan berdasarkan perintah khusus dari Bupati atau menindaklanjuti temuan dari BPK atau BPKP. PK3 menegaskan bahwa pelaksanaan audit ini memiliki fleksibilitas dengan menyatakan bahwa

*“Inspektorat melaksanakan audit berdasarkan PKPT, tetapi juga dapat diperintahkan langsung oleh Bupati, baik secara lisan maupun tertulis.” (PK3, KS2, K1)*

Setelah dasar pelaksanaan ditentukan, tahapan selanjutnya adalah **pembentukan tim auditor** oleh IRBAN (Inspektur Pembantu) sesuai dengan objek yang akan diperiksa. PK3 mengungkapkan bahwa :

*“kami akan membentuk tim dari IRBAN yang bertanggung jawab... atau menggabungkan IRBAN lain dalam proses audit OPD.” (PK3, KS2, K1)*

Selanjutnya, divisi perencanaan menyiapkan **Surat Tugas** yang diberikan kepada tim auditor sebagai dasar operasional. JH1 menjelaskan bahwa

*“setelah PKPT diarahkan kepada tim lewat instruksi pimpinan... bagian perencanaan menyiapkan surat tugas.” (JH1, KS2, K1)*

Setelah tim terbentuk, auditor mengirimkan **Surat Permintaan Dokumen** kepada OPD yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai permohonan resmi terhadap dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan. PK3 menerangkan bahwa:

*“kami membuat surat permintaan dokumen kemudian mengirimkan ke OPD yang terkait.” (PK3, KS2, K1)*

Setelah menerima surat itu, **OPD menyerahkan dokumen administrasi** sesuai dengan daftar yang telah diminta. Namun, seringkali proses ini mengalami keterlambatan yang berdampak pada jadwal audit. Informasi JH1 mengakui bahwa:

*“biasanya tembus waktunya... karena lambatnya OPD mengumpulkan dokumen yang diminta.” (JH1, KS2, K1)*

Dokumen yang sudah diterima kemudian diinventarisasi dan diperiksa kelengkapannya sebelum memasuki pada **tahap pemeriksaan** mendalam. Pada tahap ini, auditor masih sangat bergantung pada metode manual. Meskipun demikian, teknologi informasi tetap digunakan untuk mendukung proses verifikasi, seperti melalui OM-SPAN untuk data DAK dan SIPD-RI untuk data perencanaan dan anggaran, terdapat juga E-AUDIT untuk data SIPTL dan SIKAD. AE2 menjelaskan bahwa:

*“semua dokumen yang diperlukan sudah ada di OM-SPAN... kita hanya perlu mencocokkan nominalnya.” (AE2, KS2, K1)*

Apabila terdapat perbedaan atau kekurangan informasi, auditor akan melakukan **klarifikasi** secara langsung kepada OPD. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diteliti sesuai dengan regulasi yang ada. Informasi AE2 menjelaskan proses ini dengan mengatakan bahwa:

*“kalau tidak cocok, kita tolak dan mereka perbaiki sampai balance.” (AE2, KS2, K1)*


Proses klarifikasi dapat berlangsung beberapa kali sehingga seluruh dokumen yang diperlukan menjadi lengkap dan sah.

Tahap berikutnya adalah **penyusunan temuan** hasil audit, dimana auditor menemukan ketidaksesuaian, kelemahan dalam pengendalian, atau kemungkinan kerugian daerah. Hasil temuan ini dibuat berdasarkan pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari OPD. Seperti yang dijelaskan oleh JH1:

*“kalau ada temuan, kita lakukan pembinaan untuk perbaikan.... atau minta pengembalian kalau ada kerugian.” (JH1, KS2, K1)*

Temuan yang telah dirumuskan kemudian dituangkan dalam **Laporan Hasil Audit (LHA)**, yang selanjutnya diserahkan kepada inspektur untuk direview dan disampaikan kepada OPD terkait sebagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

**Gambar 4. 7 Contoh LHA**



PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN


HASIL REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN  
DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN DAN KB  
SUBBIDANG Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan  
TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Pemda : KAB. SORONG SELATAN  
OPD Pelaksana Kegiatan : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
Jenis DAK Fisik : DAK Penugasan

KKR Nomor : L. 01/REV-APP/2025  
Direvisi Oleh : TIM REVIU INSPEKTORAT

NO	Bidang/ Subbidang	Pagu	Penyaluran	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Persentase Penyerapan Dana	Persentase Capaian Output
				Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap ini		
1	D03   Kesehatan dan KB D03304   Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	22.518.911.000	1.763.043.940	0	1.635.350.074	1.635.350.074	92,76%	26,49%

Simpulan Hasil Reviu	Input OPD	Hasil Reviu
% Penyerapan Dana	92,76%	92,76%
% Capaian Keluaran (Output)	26,49%	26,49%

10 Oktober 2025  
Sorongan  
  
INSPEKTORAT  
SORONG SELATAN  
19730713201127004

Hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 10-10-25 08:58:32

Sumber : Dokumen, (2025)

Dengan cara ini, proses pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan dilakukan melalui beberapa langkah, seperti perencanaan, persiapan, pengumpulan dokumen, pemeriksaan secara manual dan berbasis teknologi informasi, klarifikasi, penyusunan temuan, hingga penyampaian laporan. Proses ini mengindikasikan bahwa walaupun sudah ada penggunaan teknologi informasi, tetapi audit masih sangat mengandalkan pemeriksaan manual, sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi audit.

#### 4.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Audit

**Tabel 4. 5 Kode Tema Pemanfaatan TI dalam proses Audit**

Kategori	Kode Kategori	Tema	Kode Tema
OM-SPAN	KS3	Pemanfaatan TI dalam Proses Audit	K2
SIPD-RI	KS4		
E-AUDIT	KS5		

Sumber : Olah Data, (2025).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan kemajuan yang cukup baik meskipun penerapannya masih belum sepenuhnya terintegrasi di semua tahapan audit. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, teknologi informasi lebih banyak digunakan pada proses reviu/tinjauan, verifikasi data, dan pemantauan lanjutan dari laporan hasil audit dibandingkan pada proses audit yang bersifat substansial. Narasumber JH1 menjelaskan bahwa proses audit masih dilakukan dengan cara manual, sementara teknologi informasi hanya dipakai untuk mendukung kegiatan tertentu. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa:

*“untuk proses audit kita masih manual... aplikasi hanya digunakan pada tahapan reviu.” (JH1, K2)*

Dengan demikian, teknologi informasi belum berfungsi sebagai instrumen utama dalam audit, melainkan lebih sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas auditor.

##### a. OM-SPAN

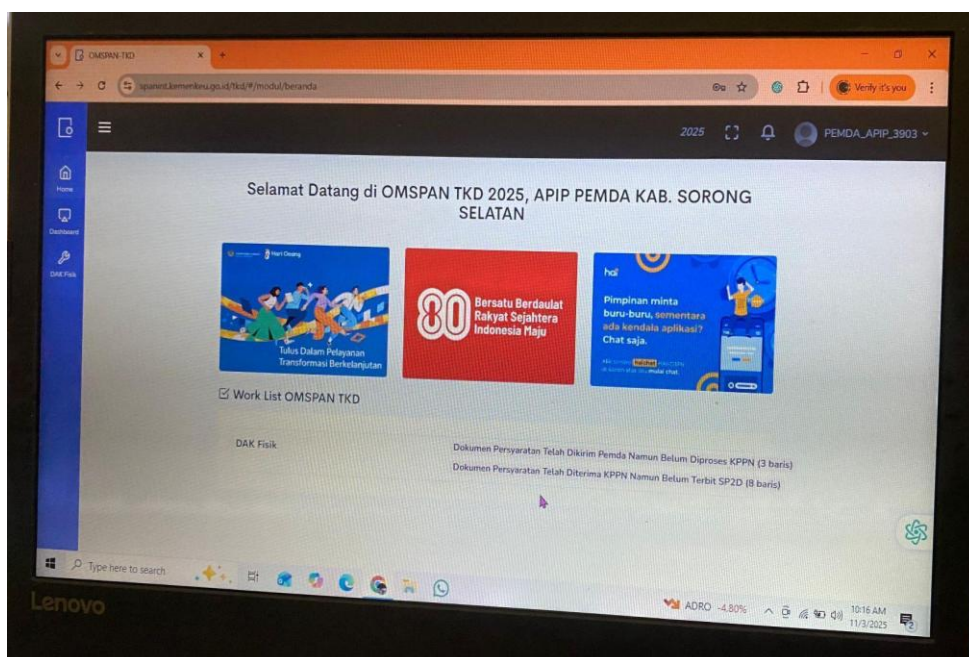
Aplikasi OM-SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) adalah Aplikasi berbasis WEB Kementerian Keuangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran negara secara langsung, termasuk kondisi SPM/SP2D, realisasi anggaran, serka kinerja keuangan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terutama oleh Inspektorat dalam menilai kinerja satuan kerja di daerahnya (KPPN Sorong, 2020). Penggunaan teknologi informasi lebih tampak jelas pada fase verifikasi data, khususnya

dalam kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus). Informan AE2 yang berperan sebagai admin DAK, menjelaskan bahwa auditor memanfaatkan aplikasi OM-SPAN untuk memeriksa kelengkapan dan kecocokan dokumen DAK. Ia mengatakan bahwa:

*“semua dokumen yang diperlukan sudah tersedia di OM-SPAN... kita hanya perlu mencocokkan angkanya,” (AE2, KS4, K2)*

hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini memudahkan proses verifikasi tanpa perlu meminta dokumen fisik dari OPD.

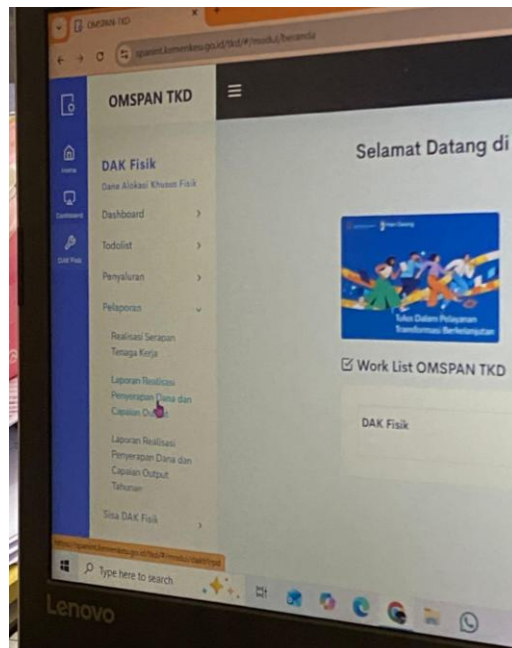
**Gambar 4. 8 Website OM-SPAN**



Sumber: Dokumentasi, (2025)

Inspektorat dalam memanfaatkan OM-SPAN untuk memonitor transaksi, memverifikasi data penyedia, mengawasi kontrak, serta memperoleh data kinerja anggaran satuan kerja secara mandiri, yang mendukung pengawasan dan penilaian pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi tersebut dapat menghemat waktu dan mempercepat proses validasi data, terutama saat memeriksa kesesuaian antara laporan dan komponen belanja.

**Gambar 4.9 Halaman DAK**



Sumber: Dokumentasi, (2025)

Halaman Dana Alokasi Khusus (DAK) Inspektorat umumnya merujuk pada bagian dari situs web Inspektorat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yang berisi informasi, regulasi, panduan rewiu, atau laporan terkait pengawasan DAK

**b. SIPD-RI**

Sementara itu, informan PK3 menegaskan bahwa teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk mengakses dokumen perencanaan dan anggaran melalui aplikasi SIPD-RI, meskipun akses tersebut tidak tersedia untuk semua auditor. Ia menyatakan:

*“SIPD-RI hanya diakses oleh admin internal... kami hanya mengambil data,” (JH3, KS4, K2)*

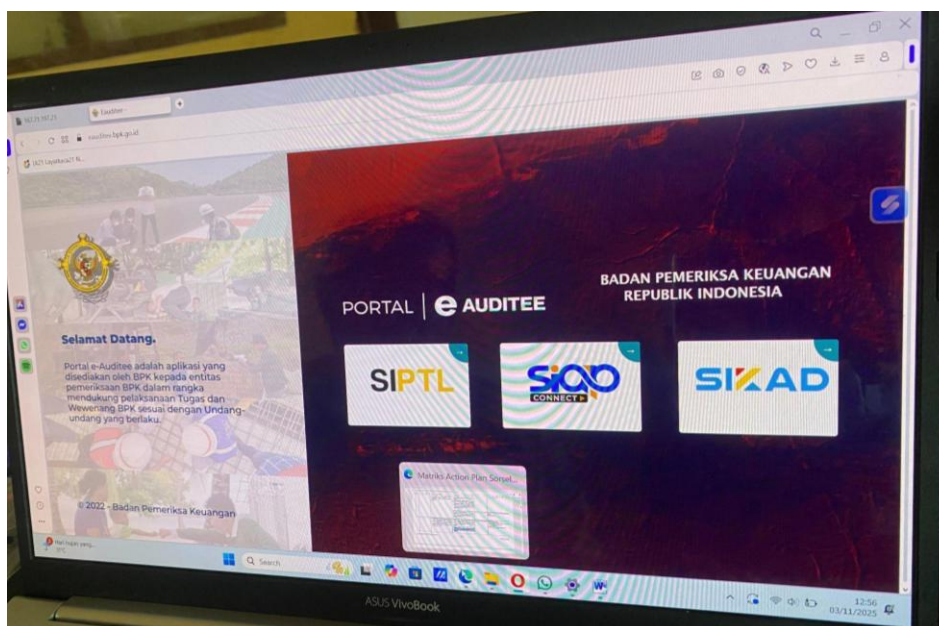
SIPD-RI merujuk pada penerapan (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia) di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Sistem ini adalah aplikasi nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengelola informasi pemerintah daerah secara terpusat, transparan, dan akuntabel (Modul SIPD RI, 2024). Sehingga penggunaan teknologi informasi tetap terbatas pada staf yang memiliki hak akses tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam audit belum merata dan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor penghalang seperti level penggunaan dan kebijakan akses.

### c. E-AUDIT

Data yang paling memperdalam pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi berasal dari informan BS4 selaku admin aplikasi E-AUDIT, yang bertugas dalam aplikasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Aplikasi E - Audit pemerintah adalah sistem informasi pengawasan terintegrasi berbasis elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah.

**Gambar 4. 10 Portal E-AUDIT**

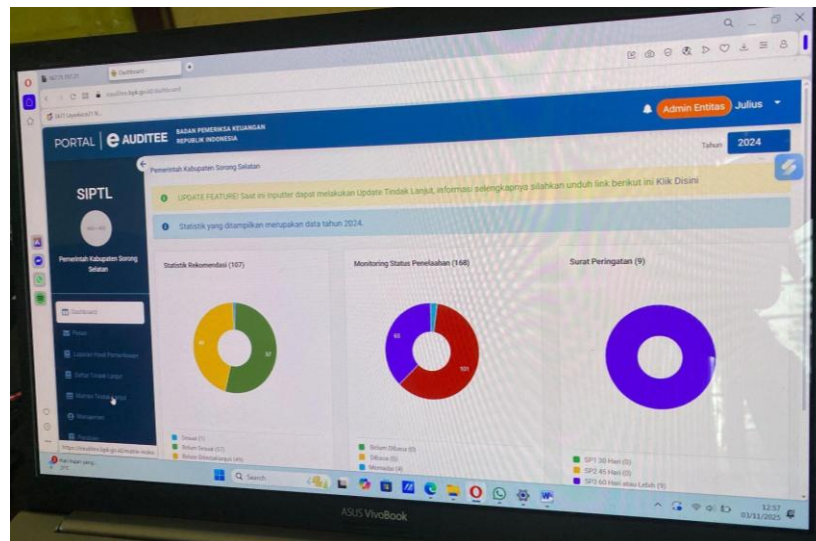


Sumber: Dokumentasi, (2025)

BS4 menjelaskan bahwa saat ini Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan memanfaatkan **SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)** dan **SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah)** untuk melaporkan kemajuan dalam menangani rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ia menyatakan bahwa:

*“di SIPTL kita bisa upload semua apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi BPK... kita scan lalu input di SIPTL setelah di verifikasi oleh BPK.” (BS4, KS5, K2)*

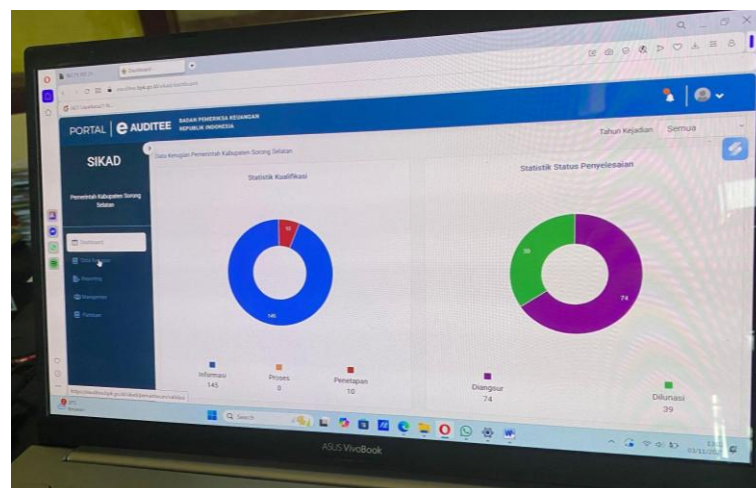
**Gambar 4. 11 Halaman SIPTL**



Sumber: Dokumentasi, (2025)

**SIPTL** merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara elektronik dan terintegrasi, sehingga mendukung proses pengawasan yang lebih cepat, efisien, transparan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

**Gambar 4. 12 Halaman SIKAD**



Sumber: Dokumentasi, (2025)

**SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah)** merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengelola dan memantau penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah secara

terintegrasi dan daring. Sistem ini berfungsi sebagai basis data terpusat dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) terkait kerugian daerah, sehingga mendukung proses pengawasan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Dalam konteks ini, teknologi informasi berfungsi sebagai sarana untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tindak lanjut hasil audit, serta mempermudah pelaporan kepada BPK. Walaupun ada berbagai kendala, manfaat dari pemanfaatan teknologi informasi cukup terasa terutama dalam hal efisiensi pekerjaan. BS4 menegaskan,:

*“manfaatnya yaa kita tidak lagi perlu bawa dokumen banyak-banyak... cukup bawa laptop dengan pengecekan dokumennya,” (BS4, KS5, K2)*

yang menunjukkan bahwa digitalisasi dokumen dapat mengurangi beban administratif dan mempercepat proses pemeriksaan. Temuan ini mendukung bahwa teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas audit meskipun penerapannya masih belum maksimal dan lebih banyak terlihat pada tahap pemantauan tindak lanjut, bukan pada pemeriksaan utama.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi informasi di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan telah berkontribusi pada beberapa tahap audit, terutama dalam verifikasi data dan tindak lanjut atas rekomendasi. Namun, teknologi tersebut belum diterapkan secara menyeluruh dalam proses audit, mengingat bahwa pemeriksaan fisik dan analisis dokumen masih dilakukan dengan cara manual. Penerapan aplikasi seperti SIPD, OM-SPAN, SIPTL, dan SIKAD menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian dari sistem pengawasan, tetapi terdapat kendala seperti kurangnya kapasitas pengguna, keterbatasan jaringan, dan minimnya pelatihan yang menghambat optimalisasi fungsi teknologi tersebut dalam audit.

**Tabel 4. 6 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Audit**

<b>Aspek Pemanfaatan TI</b>	<b>Temuan Utama di Lapangan</b>	<b>Kutipan Wawancara</b>
Penggunaan TI dalam proses review audit	TI belum digunakan untuk pemeriksaan inti, hanya pada tahap review dan verifikasi	<i>“Untuk proses audit kita masih manual... aplikasi hanya digunakan pada</i>

	tertentu	<i>tahapan review.</i> ” – <b>JH1</b>
Akses data perencanaan dan keuangan (SIPD-RI)	Auditor memanfaatkan data SIPD melalui admin internal; akses tidak diberikan kepada semua auditor.	<i>“SIPD hanya bisa diakses admin internal... kami hanya ambil data.”</i> – <b>JH1</b>
Verifikasi DAK melalui OM-SPAN	Data DAK diverifikasi melalui OM-SPAN sehingga mempercepat pencocokan dokumen tanpa harus meminta banyak berkas fisik.	<i>“Dokumen yang dibutuhkan sudah ada semua di OM-SPAN... kita tinggal cocokkan nominalnya.”</i> – <b>AE2</b>
Pemantauan tindak lanjut BPK melalui SIPTL	Inspektorat mengupload bukti tindak lanjut rekomendasi BPK melalui SIPTL.	<i>“Di SIPTL kita bisa upload semua apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi BPK... kita scan lalu input di SIPTL.”</i> – <b>BS4</b>
Pengelolaan kerugian negara melalui SIKAD	Untuk kasus kerugian negara/daerah, admin menggunakan SIKAD sebagai alat pelaporan digital.	<i>“Untuk SIKAD itu khusus laporan kerugian negara... kita update sesuai perkembangan.”</i> – <b>BS4</b>
Dokumen digital menggantikan dokumen fisik	TI mengurangi kebutuhan membawa dokumen fisik dan mempercepat pemeriksaan.	<i>“Manfaatnya ya kita tidak lagi perlu bawa dokumen banyak-banyak... cukup bawa laptop.”</i> – <b>BS4</b>
Koordinasi berbasis TI (WA/Zoom)	Pelatihan formal tidak ada; koordinasi dilakukan melalui media digital.	<i>“Pelatihan tidak ada... biasanya kita koordinasi dengan BPK lewat WA atau Zoom.”</i> – <b>BS4</b>
Keterbatasan jaringan internet	Hambatan utama adalah koneksi internet yang tidak stabil sehingga upload dokumen sering gagal.	<i>“Kalau kendala sih jaringan... kadang data tidak bisa ter-upload karena jaringan tidak stabil.”</i> – <b>BS4</b>
Keterbatasan hak akses auditor	Tidak semua auditor memiliki akses ke aplikasi, sehingga pemanfaatan TI tidak merata.	<i>“Hanya admin yang bisa buka... auditor lain tidak bisa akses.”</i> – <b>JH1</b>

Sumber : Olah Data, (2025)

#### 4.2.5. Kompetensi dan Kesiapan Auditor

Tabel 4. 7 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit

Kategori	Kode Kategori	Tema	Kode Tema
Kemampuan Auditor	KS7	Kompetensi dan Kesiapan Auditor	K4

Sumber : Olah Data, (2025)

Kemampuan dan kesiapan para auditor dalam menggunakan teknologi informasi di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan tergolong baik, tetapi distribusinya di antara pegawai masih belum merata. Melalui wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa auditor pada umumnya sudah mengerti cara penggunaan aplikasi dasar dan dapat beradaptasi dengan sistem digital, namun mereka menghadapi beberapa kendala berkaitan dengan akses, delegasi tugas, dan kurangnya pelatihan khusus yang mendukung peningkatan keterampilan teknis. Informan JH1 mengungkapkan bahwa meskipun kemampuan auditor untuk menggunakan aplikasi pemerintahan cukup memadai, akses mereka terhadap aplikasi tertentu sangat terbatas. Ia menyebutkan bahwa:

*“SIPD hanya dapat diakses oleh admin internal... kami hanya mengambil data,” (JH1, KS7, K4)*

yang menunjukkan bahwa walaupun auditor memahami cara kerja aplikasi, mereka tidak selalu memiliki hak untuk mengaksesnya secara langsung.

Dari segi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi, kemampuan auditor dalam menggunakan sistem pendukung seperti OM-SPAN dan dokumen digital yang disediakan oleh OPD terbilang baik. Namun, kemampuan ini lebih bersifat reaktif ketimbang hasil dari pelatihan resmi. BS4 menjelaskan bahwa tidak terdapat pelatihan khusus yang berkaitan dengan penggunaan E-AUDIT, SIPTL, maupun SIKAD. Ia menyatakan,

*“Untuk pelatihan tidak ada. . . kita hanya berkoordinasi dengan BPK melalui WhatsApp atau Zoom,” (BS4, KS7, K4)*

yang menunjukkan bahwa kemampuan auditor lebih berkembang melalui pengalaman di lapangan dan bimbingan informal, bukan melalui program peningkatan kapasitas yang terorganisir.

Kesiapan auditor untuk mengintegrasikan teknologi informasi sebenarnya sudah cukup tinggi, terlihat dari kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan aplikasi baru meskipun tanpa adanya pelatihan formal. BS4 bahkan menyatakan bahwa auditor cenderung mencari solusi secara mandiri ketika mengalami masalah dalam sistem. Namun, kesiapan auditor tidak selalu sejalan dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan dari organisasi. Masalah jaringan yang sering muncul membuat proses penerapan teknologi informasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, keterampilan auditor dalam menggunakan teknologi informasi berada pada tingkat yang cukup, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Auditor memiliki kemampuan dasar yang baik dan semangat untuk belajar, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam mengakses aplikasi, kurangnya pelatihan, dan masalah infrastruktur. Dengan situasi ini, kesiapan auditor untuk beralih ke audit berbasis digital sebenarnya sudah ada, namun memerlukan dukungan organisasi yang lebih kuat agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan dengan optimal di semua tahap audit.

#### 4.2.6. Kendala dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

**Tabel 4. 8 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit**

Kategori	Kode Kategori	Tema	Kode Tema
Jaringan Internet tidak Stabil	KS8	Kendala dalam Pemanfaatan TI	K5
Keterlambatan Dokumen Digital dari OPD	KS9		
Audit Lapangan masih Manual	KS10		

Sumber : Olah Data, (2025)

##### a. Jaringan Internet Tidak Stabil

Meskipun teknologi informasi telah memberikan dukungan dalam proses audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan, penggunaannya masih menghadapi

berbagai tantangan yang menghalangi penerapannya secara maksimal. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah ketidakstabilan jaringan internet. Hal ini langsung berpengaruh pada keterlambatan dalam mengunggah dokumen, akses ke aplikasi, serta proses verifikasi yang bergantung pada sistem berbasis online. Informan BS4 menjelaskan situasi ini dengan menyatakan bahwa:

*"kadang-kadang data atau dokumen tidak dapat di-upload karena jaringan yang tidak stabil," (BS4, KS8, K5)*

sehingga pelaporan tindak lanjut rekomendasi BPK melalui SIPTL dan SIKAD seringkali terkendala. Gangguan pada jaringan memaksa auditor untuk mencari waktu atau tempat tertentu guna memastikan proses pengunggahan bisa berlangsung dengan baik.

Selain masalah jaringan, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas auditor dalam mengoperasikan aplikasi berbasis teknologi informasi. Menurut keterangan dari BS4, tidak ada pelatihan khusus yang diperuntukkan bagi auditor mengenai penggunaan aplikasi audit. Ia menyampaikan bahwa:

*"untuk pelatihan, tidak ada. . . kita hanya berkoordinasi dengan BPK lewat WhatsApp atau Zoom," (BS4, KS8, K5)*

yang menunjukkan bahwa penggunaan TI lebih banyak dipelajari secara mandiri tanpa adanya program pelatihan formal dari instansi. Situasi ini membuat beberapa auditor dapat menyesuaikan diri, namun tetap ada kemungkinan terjadinya perbedaan kompetensi di antara pegawai, terutama ketika ada aplikasi terbaru atau pembaruan sistem.

#### **b. Keterlambatan Dokumen Digital dari OPD**

Keterbatasan akses terhadap aplikasi juga menjadi halangan dalam penggunaan teknologi informasi. Informan JH1 menjelaskan bahwa beberapa aplikasi seperti SIPD-RI hanya dapat diakses oleh admin tertentu, sehingga auditor tidak bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut meskipun memerlukan data yang ada di dalamnya. Ketergantungan auditor pada satu atau dua admin menyebabkan audit terhambat ketika admin tidak tersedia atau saat data perlu diakses dengan

cepat.

Selain itu, hambatan juga muncul dari pihak OPD. Banyak OPD yang belum siap untuk menyerahkan dokumen dalam waktu yang tepat atau dalam format digital. Informan JH1 mengungkapkan bahwa keterlambatan dari OPD seringkali menghambat proses audit. Ia menyatakan,:

*“biasanya ada tenggat waktu. . . karena lambatnya OPD dalam mengumpulkan dokumen,” (JH1, KS9, K5)*

yang menunjukkan bahwa kesiapan dari OPD mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi informasi bagi auditor. Ketika OPD terus bergantung pada dokumen manual dan tidak menyiapkan dokumen digital lebih awal, auditor kesulitan dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi verifikasi seperti OM-SPAN atau SIPD.

### **c. Audit Lapangan masih Manual**

Kendala terakhir adalah tidak adanya sistem integrasi yang memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan semua tahap audit dengan cara digital. Proses audit masih sangat bergantung pada pemeriksaan secara manual untuk memverifikasi bukti fisik, mengevaluasi kesesuaian aktivitas, dan melihat dokumen secara langsung. Informan JH1 menekankan hal ini dengan menyatakan bahwa:

*“proses audit kita masih dilakukan secara manual... aplikasi hanya digunakan pada tahap review,” (JH1, K10, K5)*

yang menunjukkan bahwa teknologi informasi hanya berperan sebagai alat tambahan, bukan sebagai sistem utama dalam audit. Kurangnya integrasi TI mengakibatkan teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan utama dalam penggunaan TI mencakup hambatan jaringan, kurangnya pelatihan, batasan akses aplikasi, rendahnya kesiapan OPD, serta tidak terintegrasinya sistem audit secara menyeluruh. Tantangan-tantangan ini menggambarkan bahwa meskipun teknologi informasi sudah mulai diterapkan, dukungan infrastruktur, pelatihan, dan kebijakan teknis

masih perlu ditingkatkan agar TI benar-benar dapat meningkatkan efektivitas audit secara keseluruhan.

**Tabel 4. 9 Kendala dalam pemanfaatan TI dalam Audit**

Aspek Kendala	Deskripsi Kendala	Kutipan Wawancara	Informan
Jaringan Internet Tidak Stabil	Jaringan lemah membuat proses upload dokumen terhambat, terutama pada aplikasi online seperti SIPTL dan SIKAD.	“Kadang data atau dokumen tidak bisa ter-upload karena jaringan tidak stabil.”	BS4
Minimnya Pelatihan TI	Tidak ada pelatihan khusus untuk penggunaan aplikasi audit; auditor belajar secara mandiri.	“Untuk pelatihan tidak ada... kita hanya koordinasi dengan BPK lewat WhatsApp atau Zoom.”	BS4
Keterbatasan Hak Akses Aplikasi	Auditor tidak bisa mengakses aplikasi seperti SIPD-RI sehingga bergantung pada admin.	“SIPD hanya bisa diakses admin internal... kami hanya ambil data.”	JH1
Keterlambatan Dokumen dari OPD	Banyak OPD terlambat menyerahkan dokumen sehingga memperlambat proses pemeriksaan dan penggunaan aplikasi.	“Biasanya tembus waktunya... karena lambatnya OPD mengumpulkan dokumen.”	JH1
Proses Audit Masih Dominan Manual	TI hanya digunakan pada tahap review; pemeriksaan inti tetap manual sehingga TI belum optimal.	“Untuk proses audit kita masih manual... aplikasi hanya digunakan pada tahapan review.”	JH1
Kurangnya Integrasi Sistem Audit	Belum ada sistem audit digital terpadu, sehingga auditor harus menggabungkan manual dan digital.	“Sistemnya belum menyeluruh, jadi kita masih pakai cara manual dan digital.”	PK3 (berdasarkan penjelasan tentang alur manual)
Kendala Upload Dokumen Besar	File dokumen besar sulit diunggah saat jaringan lemah, memperlambat pelaporan tindak lanjut.	Kalau jaringan lelet, susah sekali upload berkas besar di SIPTL.”	BS4
Ketergantungan pada OPD yang Belum Digital	Banyak OPD belum menyiapkan dokumen digital, sehingga TI tidak bisa digunakan maksimal.	“OPD kadang masih kasih dokumen manual... belum siap digital semua.”	PK3 / JH1

Sumber : Olah Data, (2025)

#### 4.2.7. Dampak TI terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Proses Audit

Tabel 4. 10 Kode Tema Pengaruh TI pada Proses Audit

Kategori	Kode Kategori	Tema	Kode Tema
Meningkatkan Efisiensi Kerja Auditor dan Akurasi Hasil Kerja	KS11	Dampak TI terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Audit	K6
Mempercepat Tindak Lanjut Temuan	KS12		

Sumber : Olah Data, (2025)

##### a. Meningkatkan Efisiensi Kerja Auditor

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan efek yang signifikan terhadap performa auditor dan tanggung jawab hasil audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan. Secara umum, TI mempercepat, mempermudah, dan memfokuskan tugas auditor. Banyak dokumen yang dulunya perlu dicetak atau diangkut secara fisik, kini bisa diakses lewat aplikasi. BS4 menyatakan bahwa:

*"kita tidak perlu lagi membawa banyak dokumen. . . cukup membawa laptop,"*

*(BS4, KS11, K6)*

sehingga proses pemeriksaan menjadi jauh lebih efisien. Teknologi juga meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam pemeriksaan. Dengan aplikasi seperti OM-SPAN, auditor dapat langsung mencocokkan data anggaran dengan realisasinya tanpa harus mengumpulkan dokumen fisik dari OPD. AE2 menjelaskan bahwa *"semua dokumen sudah tersedia di OM-SPAN. . . hanya perlu mencocokkan angkanya,"* (AE2, KS11, K6) yang menandakan bahwa TI mempermudah proses pengecekan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

##### b. Mempercepat Tindak Lanjut Temuan

Dalam konteks akuntabilitas, pengaruh teknologi informasi sangat terlihat. Dengan adanya aplikasi seperti SIPTL dan SIKAD, semua bukti tindak lanjut kini bisa diunggah secara digital. BS4 menjelaskan bahwa *"di SIPTL kita mengunggah semua sesuai dengan rekomendasi BPK... kemudian akan diverifikasi,"* yang mengakibatkan proses tindak lanjut lebih transparan dan dapat diawasi dengan baik. Sistem ini memastikan bahwa setiap aksi yang

dilakukan oleh auditor memiliki jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, pengaruh teknologi informasi belum sepenuhnya optimal karena beberapa pemeriksaan masih dilakukan secara manual.

Namun, teknologi informasi sudah cukup membantu untuk mempercepat proses, meningkatkan ketepatan, dan memperkuat akuntabilitas dalam audit. Secara umum, teknologi informasi menjadikan audit lebih cepat, lebih tepat, dan lebih mudah untuk diawasi, meskipun belum mampu mendukung semua tahap pemeriksaan secara menyeluruh.

#### 4.2.8. Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menerapkan triangulasi data untuk menjamin keaslian dan kepercayaan pada hasil yang didapat. Triangulasi dilakukan dengan menilai berbagai sumber informasi, metode pengumpulan data, dan perspektif dari informan. Ini sangat penting agar temuan penelitian tidak hanya bersumber dari satu perspektif, tetapi melalui proses verifikasi yang saling mengaitkan antar data.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

##### 1. Triangulasi Sumber

**Tabel 4. 11 Triangulasi Sumber**



Aspek yang Dicek	JH1	AE2	PK3	BS4	Kesimpulan Triangulasi
Audit lapangan masih manual	“Audit masih manual... lihat langsung ke lapangan.”	Menguatkan bahwa audit fisik manual	Tidak menyinggung detail	Tidak membahas audit fisik	Konsisten – audit fisik belum memakai TI
Penggunaan OM-SPAN	Tidak menjelaskan	“Dokumen ada semua di OM-SPAN... tinggal cocokkan nominalnya.”	Tidak menjelaskan	Mengetahui penggunaan	Valid – OM-SPAN dipakai untuk DAK
Akses SIPD terbatas	“SIPD hanya admin... kami ambil data saja.”	Tidak relevan	Tidak menjelaskan	Tidak relevan	Valid – akses SIPD memang terbatas



Penggunaan SIPTL	Tidak menjelaskan	Tidak menjelaskan	Tidak menjelaskan	“Di SIPTL kita upload semua sesuai rekomendasi BPK.”	Valid – SIPTL dipakai auditor tindak lanjut
Penggunaan SIKAD	Tidak menjelaskan	Tidak menjelaskan	Tidak menjelaskan	“Kalau kerugian kita input di SIKAD... semua rekodnya ada.”	Valid – SIKAD dipakai untuk kerugian
Kendala Jaringan		<i>“Paling karena jaringan yang kurang bagus, itu bikin kita kalau buka aplikasi jadi lemot”</i>		“Kadang dokumen tidak bisa ter-upload karena jaringan tidak stabil.”	Valid – kendala utama ada di AE2 dan BS4
Digitalisasi Dokumen	Tidak menyinggung	Mengetahui	Tidak menjelaskan	“Sekarang cukup bawa laptop... dokumen sudah digital.”	Konsisten – dokumen digital dipakai semua auditor

Sumber: Olah Data, 2025.

## 2. Triangulasi Metode

Tabel 4. 12 Triangulasi Metode

Aspek yang Dicek	Wawancara	Dokumentasi	Observasi	Hasil Triangulasi
Penggunaan OM-SPAN untuk verifikasi DAK	AE2: <i>“Dokumen ada semua... tinggal cocokkan.”</i>		Auditor terlihat menggunakan OM-SPAN	Valid & konsisten
Digitalisasi dokumen OPD	BS4: <i>“Cukup bawa laptop... semua digital.”</i>		Auditor membuka dokumen digital	Valid
Kendala jaringan	BS4: <i>“Tidak bisa</i>	Banyak file	Observasi:	Sangat Valid

	<i>upload kalau jaringan lemah.”</i>	pending di SIPTL	jaringan sering lambat	
Audit lapangan masih manual	JH1: <i>“Audit masih manual... lihat langsung.”</i>	LHP berisi foto fisik lapangan	Observasi: auditor ambil bukti langsung	Sangat Valid
Pemanfaatan SIPTL	BS4: <i>“Upload bukti tindak lanjut ke SIPTL.”</i>		Terlihat auditor login SIPTL	Valid
Pencatatan kerugian di SIKAD	BS4: <i>“Kerugian kita input di SIKAD.”</i>		Auditor menggunakan SIKAD	Valid dan Konsisten

Sumber: Olah Data, 2025.

Berdasarkan tabel triangulasi sumber dan metode yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa data penelitian menunjukkan konsistensi, keandalan, dan saling memperkuat. Perbandingan antara wawancara, dokumen, dan observasi mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi—seperti OM-SPAN, SIPTL, SIKAD, dan dokumen digital—benar-benar diterapkan dalam proses audit, sedangkan audit fisik masih dilakukan secara manual. Ini menunjukkan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Peran TI dan Teori Task Technology Fit (TTF)

Hasil riset menunjukkan bahwa teknologi informasi (TI) memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung proses audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan, terutama pada fase pengelolaan dan verifikasi data. Penggunaan aplikasi seperti OM-SPAN, SIPD-RI, SIKAD, dan SIPTL memudahkan auditor dalam mengakses dokumen digital, mencocokkan informasi, melacak bukti tindak lanjut, serta mencatat kerugian daerah dengan lebih cepat dan teratur.

Peran TI yang paling nyata terlihat pada aktivitas administratif audit seperti:

- pencocokan nominal belanja dan pendapatan,
- verifikasi dokumen OPD dalam format PDF/Excel,
- pengunggahan bukti tindak lanjut BPK,
- penyelesaian kerugian daerah,

- pengelolaan data anggaran dan realisasi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa TI telah memastikan ketersediaan data dan mempercepat alur pemeriksaan administratif.

Jika dikaitkan dengan **Teori Task Technology Fit (TTF)** dari Goodhue & Thompson (1995), teknologi akan efektif jika fitur dan kemampuan sistem sesuai dengan kebutuhan tugas pengguna. Dalam konteks penelitian ini:

- **Tugas (task):** verifikasi data, analisis dokumen, tindak lanjut rekomendasi, input data kerugian.
- **Teknologi (technology):** OM-SPAN, SIPTL, SIKAD, dokumen digital.

Terdapat **tingkat kesesuaian (fit)** yang baik antara teknologi dan tugas administratif audit. TI mendukung auditor dalam aspek kecepatan, kemudahan akses, dan ketepatan data.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa **fit** antara TI dan tugas inti audit seperti pemeriksaan fisik, observasi lapangan, dan validasi kondisi riil masih rendah. Ini menunjukkan bahwa TI belum dapat menggantikan aktivitas audit substantif yang menuntut observasi langsung. Dengan demikian, TI **sudah** FIT terhadap tugas administrasi dan dokumentasi, TI **belum** FIT terhadap tugas inti pemeriksaan fisik. Kesimpulannya, berdasarkan TTF, efektivitas TI pada Inspektorat Sorong Selatan **bersifat parsial**: efektif pada support system, namun belum menyentuh proses inti audit.

#### 4.3.2. Efektivitas Audit dan Dukungan Teknologi

Efektivitas audit dievaluasi berdasarkan ketepatan, kecepatan, kelengkapan data, serta tingkat akuntabilitas dari laporan yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam aspek-aspek tersebut, terutama dalam mempercepat proses verifikasi dokumen dan meningkatkan akurasi data keuangan. TI memungkinkan para auditor untuk mengakses dokumen digital tanpa harus membawa berkas fisik. BS4 menyatakan bahwa “Kini hanya perlu membawa laptop. . . semua dokumennya sudah berbentuk digital,” yang mengindikasikan bahwa ada peningkatan efisiensi dan penghematan waktu dalam proses audit.

Di samping itu, aplikasi seperti OM-SPAN meningkatkan akurasi data karena auditor bisa langsung mencocokkan nominal dengan data yang sudah tervalidasi dalam sistem. AE2 menekankan bahwa “Jika datanya tidak seimbang, kita akan tolak dulu,” yang menunjukkan adanya mekanisme kontrol otomatis yang mendukung akurasi audit. TI juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui SIPTL dan SIKAD, yang menyimpan bukti tindak lanjut dan data kerugian daerah dalam format digital dan dapat dilacak kapan saja. BS4 menyebutkan bahwa “Semua bukti tindak lanjut memiliki catatannya,” yang menunjukkan bahwa TI berkontribusi dalam menciptakan jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi.

Meskipun begitu, efektivitas yang ada masih jauh dari maksimal disebabkan oleh beberapa masalah, seperti koneksi internet yang tidak konsisten, keterbatasan akses aplikasi bagi auditor, keterlambatan pengiriman dokumen digital dari OPD, serta kurangnya pelatihan teknologi informasi untuk auditor. Masalah-masalah ini mengakibatkan pemanfaatan teknologi informasi belum mampu mendukung semua tahap audit dengan maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi telah meningkatkan efektivitas audit khususnya dalam hal verifikasi data, akurasi informasi, dan tanggung jawab, tetapi peningkatan ini masih terbatas karena belum adanya dukungan dari infrastruktur dan keterampilan yang cukup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kontribusi teknologi informasi (TI) terhadap efisiensi proses audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Teknologi informasi memiliki pengaruh yang besar dalam mendukung kegiatan audit, terutama pada fase administrasi dan verifikasi data. Program-program seperti OM-SPAN, SIPTL, SIKAD, dan dokumen elektronik OPD membantu auditor dalam mendapatkan informasi yang cepat, lengkap, dan presisi. TI mempermudah pencocokan nominal, pengunggahan bukti tindak lanjut, serta penyelesaian kerugian daerah secara digital.
2. Efektivitas audit mengalami peningkatan melalui percepatan, ketepatan, efisiensi, dan transparansi. TI menciptakan proses verifikasi yang lebih cepat dan akurat dengan kesalahan yang minim. Selain itu, adanya audit trail dalam SIPTL dan SIKAD berkontribusi pada akuntabilitas pemeriksaan karena setiap bukti tercatat secara otomatis. Walaupun memberikan manfaat, TI belum sepenuhnya berkontribusi pada audit substantif yang masih dilakukan secara manual. Pemeriksaan fisik, observasi lapangan, dan klarifikasi kepada pihak terkait masih memerlukan pemeriksaan langsung. Oleh karena itu, TI baru memberikan dampak yang kuat pada tugas administratif, tetapi belum sepenuhnya pada pemeriksaan fisik di lapangan. Keterampilan auditor dalam menggunakan TI cukup baik, tetapi pelatihan yang didapat masih terbatas. Auditor dapat menggunakan aplikasi digital, namun sebagian besar memperoleh pengetahuan secara mandiri tanpa pelatihan resmi. Situasi ini menjadikan pemanfaatan TI belum optimal.

Terdapat beberapa masalah yang menghalangi peningkatan penggunaan TI dalam audit. Kendala yang ditemukan termasuk koneksi internet yang tidak stabil, akses terbatas pada beberapa aplikasi (seperti SIPD-RI), serta keterlambatan dalam pengiriman dokumen digital dari OPD. Hal ini menyebabkan penggunaan TI belum mencapai potensi maksimal.

Secara keseluruhan, TI telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi audit di Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat dengan meningkatkan kemampuan auditor, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan menyelaraskan sistem dengan kebutuhan audit substantif.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Untuk Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan**

Meningkatkan mutu infrastruktur teknologi informasi, khususnya stabilitas koneksi internet agar proses pengunggahan dokumen pada SIPTL dan SIKAD dapat berlangsung tanpa hambatan. Melaksanakan pelatihan atau workshop TI secara rutin, terutama mengenai sistem OM-SPAN, SIPTL, SIPD-RI, dan aplikasi audit lainnya. Mengembangkan prosedur operasional standar (SOP) dalam penggunaan TI untuk menstandarkan proses audit yang menggunakan sistem digital. Memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih disiplin dalam menyediakan dokumen digital secara tepat waktu agar audit dapat berlangsung dengan efisien.

### **2. Untuk Auditor**

Lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan TI melalui pelatihan mandiri, tutorial, atau pembelajaran internal. Memaksimalkan pemakaian semua fitur aplikasi untuk meningkatkan akurasi dan

efisiensi pemeriksaan. Mencatat hasil audit secara digital sejak awal proses untuk mempermudah dalam tindak lanjut.

3. Untuk OPD yang diaudit

Menyediakan dokumen digital yang lengkap, konsisten, dan tepat waktu untuk mendukung proses audit. Memperkuat komunikasi dengan auditor mengenai dokumen yang perlu diunggah atau disampaikan.

4. Untuk Penelitian yang Akan Datang

Dapat memperluas ruang lingkup penelitian ke inspektorat wilayah lainnya untuk membandingkan tingkat penerapan teknologi informasi. Melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap sistem TI tertentu (seperti fokus pada OM-SPAN atau SIPTL). Menggunakan metode triangulasi yang lebih beragam seperti focus group discussion (FGD) atau observasi partisipatif untuk meningkatkan data yang didapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aria Oktavian At Al. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Bpkp). *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 2, No. 8.
- Christopher & Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. (2019). Analisis Determinan Auditor Internal Pada Efektivitas Audit Internal Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Provinsi Dki Jakarta). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 8, No. 4.
- Ida Laeni At All.. (2024). Metode *Task Technology Fit* Pada Penilaian Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Perpustakaan. *Fahma : Jurnal Informatika Komputer, Bisnis, Dan Manajemen*. Vol. 22, No. 1, Pp 31-39.
- Ika Rochmawati Oktavia. (2015). Peranan Teknologi Informasi Dalam Audit. *Bhirawa :Journal Of Marketing And Commerce*. Vol. 2, No. 2.
- M. Fauzi Ilmi At Al. (2024). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Proses Audit. *Gemilang : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. Vol. 4, No. 3.
- M. Maulana At Al. (2021). Peranan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Kualitas Dan Proses Audit Di Era Digital. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)*. Vol. 1, No. 2, Hal. 169-177.
- Marikyan, D. & Papagiannidis, S. (2023) *Task-Technology Fit A: Review*. In S. Papagiannidis (Ed). *Theoryhub Book. Proposed By Goodhue & Thompson, 1995*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif.
- Murdiyanto, Eko. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Edisi I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan pengabdArman Kamal. (2022). Teknologi Informasi Dan Skeptisisme Profesional Terhadap *Fraud Detection Skills* Auditor Internal Pemerintah. *Yume : Journal Of Management*. Vol. 5, No. 2, Hal 295-313.
- Rahma Desi & Timbul Dompok. (2024). Memanfaatkan Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Pemerintahan Kota Batam. *Snistek*. Vol. 6.

- Said Saleh Salihi. (2024). Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Audit Internal. *Jitta : Journal Of International Taxation Accounting And Auditing*. Vol. 3, No. 2, Pp 140-148
- Sarwo Edi Sh. (2016). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip). *Artikel Inspektoratdaerah*.
- Silvia Dwi Anggi At Al. (2021). Peran Dan Manfaat Implementasi *Information Technology (It)* Dalam Audit Internal. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)*. Vol. 1, No. 1, Hal 1-8.
- Sirajuddin Saleh. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Pustaka Ramadhan Bandung*.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Transkrip Wawancara

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025

Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Pewawancara : Latiffah Dinar

Nama Informan : **Johan Hehanussa, SE**

Jabatan : IRBAN (Inspektur Pembantu) 1 &amp; Auditor Senior

Kode Informan : JH1

Kode Pewawancara : LD

Inisial	Percakapan
LD	Bagaimana tahapan proses audit yang dilakukan di Inspektorat Kab. Sorong Selatan?
JH1	Kalau tahapan proses audit nya, <b>pertama</b> itu mulai dari PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang sudah disusun sebelum berakhirnya tahun anggaran kita selama satu tahun, biasa disusun di bulan November - Desember setelah penetapan APBD. Nah sudah mulai diajukan untuk tahun berikutnya. Kita melakukan tugas pengawasan diantaranya ada a. Audit, b. Monitoring, c. Evaluasi, yang akan kita lakukan secara bersama-sama di tahun berikutnya. <b>Kedua</b> , proses pelaksanaan termasuk auditnya itu kita melihat kembali kepada PKPT yang menjadi acuan, di dalam PKPT itu mana yg masuk ya itu yg akan kita lakukan audit, setelah tahu mana yang akan kita lakukan audit dan waktu pelaksanaannya, selanjutnya di arahkan kepada tim lewat instruksi pimpinan dan didiskusikan dengan bagian perencanaan untuk menyiapkan surat tugas yang akan diserahkan kepada tim IRBAN ( Inspektur pembantu) wilayah, yang sesuai dengan isi surat tugas dan sesuai tupoksi yang ada di dalam PKPT. <b>Ketiga</b> , Tim IRBAN akan membuat surat yang akan diberikan ke UPD terkait untuk melaporkan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam proses audit.
LD	Dokumen seperti apa yang dibutuhkan pak?
JH1	Dokumen yang dibutuhkan itu mengacu pada jenis penugasan seperti contohnya mereka melakukan audit pengendalian jasa untuk kegiatan tertentu, nah dokumen apa yang dibutuhkan itu sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi ada juga dokumen lain yang mendukung yakni aturan yang mengatur proses kegiatan tersebut. Setelah mendapatkan dokumen yang diinginkan dilanjut dengan melakukan pemeriksaan dokumen.

LD	Kalau untuk pemeriksaan dokumennya disini sudah menggunakan Teknologi Informasi belum ya pak? Seperti aplikasi atau website?
JH1	Kalau untuk proses audit kita masih manual, kita menggunakan aplikasi hanya pada tahapan <i>review</i>
LD	Itu menggunakan aplikasi apa pak?
JH1	Aplikasi yang sudah disiapkan oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) masuknya pada sipd-ri.kemendagri.go.id yang hanya bisa di akses oleh pengelola internal kita disini dan itu hanya tim yang ditugaskan yang bisa akses dan tidak semua bisa masuk/login, dan juga kita hanya bisa menarik data yang kita butuhkan.
LD	Siapa saja yang bisa masuk/akses di sipd-ri.kemendagri.go.id tersebut pak?
JH1	Itu biasanya tim yang ditugaskan untuk melakukan audit atau biasanya yang mendapatkan tugas untuk me <i>review</i> dokumen tertentu yang akan mendapatkan akses untuk masuk di sistem tersebut.
LD	Bapak sendiri pernah mendapatkan akses untuk masuk di sistem Teknologi tersebut pak?
JH1	Saya pernah masuk, akan tetapi saya hanya membantu mengarahkan saja, dan ada tim lain yang bertanggung jawab untuk akses aplikasi tersebut.
LD	Berarti disitu kita bisa mengupload dan mengambil data/dokumen yang kita butuhkan ya pak?
JH1	Kalau meng <i>upload</i> data, kami tidak bisa, yang bisa meng <i>upload</i> data adalah pada bagian tim perencanaan, kita hanya mengambil dokumen/data tersebut untuk kepentingan <i>review</i> data/dokumen
LD	Untuk pemeriksaan dokumennya bagaimana pak?
JH1	Untuk pemeriksaan dokumennya masih manual, jadi setelah kita mengambil data di sistem/ website tersebut, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan/pemeriksaan secara manual bersama-sama dengan Tim yang sudah dibentuk.
LD	Berarti untuk pemeriksaan dokumen/data nya masih manual ya pak, apakah ada kendala selama melakukan pemeriksaan dokumen secara manual tersebut pak?
JH1	Kalo kendala, pasti ada. yang pertama dari sisi yang kita audit atau kita awasi, dan juga dari sisi internal kita. Kendala kita pertama, biasanya kalau melakukan pengawasan kan si surat tugas ada waktu yang telah ditentukan/dibatasi, biasanya kita melampau waktu tersebut, karena lambatnya mereka dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, sehingga pemeriksaannya melampaui waktu yang sudah ditentukan.
LD	Untuk hasil auditnya bagaimana pak? Apakah kendala dan apakah pernah mendapatkan temuan-temuan selama melakukan proses audit?

JH1	Untuk laporannya, terkadang mengalami ada yang namanya temuan-temuan dan kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan maupun melengkapi data/dokumen yang kurang. Tapi ada juga yang mengalami kerugian-kerugian yang kita minta mereka untuk melakukan pengembalian sesuai dengan jumlah kerugian yang ada
LD	Apakah pernah ada pelatihan untuk pemeriksaan audit ini?
JH1	Untuk pelatihan ada dan menjadi sebuah keharusan untuk kami APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), pelatihan itu kita lakukan setiap tahun, kita belum malakukan akan tetapi kita aparat disini pernah mengikuti pelatihan tersebut yang diselenggarakan oleh BPK, dan juga kita mengirim Auditor yang ada disini untuk mengikuti kegiatan diklat maupun pegawai-pegawai yang ada disini untuk mendukung tugas pengawasan.

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025

Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Pewawancara : Latiffah Dinar

Nama Informan : **Abdullah Ena, S.IP**

Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan & Admin DAK  
(Dana Alokasi Khusus)

Kode Informan : AE2

Kode Pewawancara : LD

Inisial	Percakapan
LD	Aplikasi OM-SPAM (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan ANggaran Negara) ini seperti apa ya pak? dan fungsinya untuk apa ya pak?
AE2	Aplikasi OM-SPAN BKD 2025 kementerian keuangan Saya selalu <i>review</i> DAK Fisik kemudian selalu masuk di laporan realisasi penyerapan, kita disuruh <i>review</i> karena itu salah satu syarat untuk transferan data DAK ke daerah, tidak bisa di transfer kalo kami APIP belum <i>review</i> DAK, karena itu salah satu syarat.
LD	Data apa saja yang ada didalam web/aplikasi OM-SPAN ini pak?
AE2	Ini kan OPD-OPD terkait pengelola dana DAK mereka kan sudah meng input, kan ada <i>user</i> masing-masing nih, <i>user</i> untuk inspektorat sendiri, untuk di keuangan ada juga <i>user</i> penda, kesehatan, pendidikan. Nah kalau saya itu <i>user</i> untuk <i>review</i> data yang sudah di input.
LD	Apakah bapak bisa meng <i>upload</i> data juga? atau hanya me <i>review</i> saja?
AE2	Saya hanya mencocokkan dengan daftar kegiatan mereka yang sudah ada juga di aplikasi OM-SPAN ini, jadi saya tinggal periksa kegiatan mereka apakah sudah sesuai dengan RAB apa belum.
LD	Untuk periksanya berti manual ya pak ya?
AE2	Iya, sa ceknya masih manual. Tapi sekarang sudah lebih gampang, dokumen/data yang dibutuhkan sudah ada semua di dalam aplikasi OM-SPAN ini, tinggal kita cocokkan nominalnya apakah sudah sesuai dengan yang di input. Kalau sudah dan cocok, saya tinggal setuju kemudian saya cetak hasil <i>review</i> nya, itu adalah bukti bahwa laporan DAK fisik yang sudah saya <i>review</i> sudah cocok atau <i>balance</i> .
LD	Apakah bapak melakukan <i>review</i> nya setiap hari?

AE2	Tidak, saya <i>review</i> datanya tidak setiap hari, hanya ketika ada surat penugasan dari OPD terkait, itupun biasanya setiap anggaran dibagi menjadi 3 tahapan, sesuai dengan kegiatannya
LD	Apakah dari hasil <i>review</i> yang bapak lakukan ada hasil yang mungkin belum balance atau kurang cocok begitu pak?
AE2	Kalau ada dokumen atau data yang tidak cocok dengan nominalnya, kita akan tolak dan memberikan informasi kepada OPD terkait untuk melakukan perbaikan.
LD	Penggunaan Aplikasi OM-SPAN ini sudah berapa lama pak?
AE2	Sudah lama sejak 2020 kalau ga salah ya, tapi saya mulai menjadi admin di tahun 2024, jadi saya baru satu tahun menggunakan aplikasi ini, dan sangat mempermudah sekali, kita tidak perlu mencetak banyak-banyak dokumen untuk melakukan pemeriksaan laporan. Tinggal buka aplikasi dan cek manual pada data yang sudah di upload oleh OPD terkait, dan datanya pun sudah lengkap.
LD	Apakah ada kendala pak, selama menggunakan aplikasi OM-SPAN ini?
AE2	Kendala yang sering kita hadapi itu ya jaringan saja, kalau lagi lemot ya kita cari lokasi dimana jaringan bagus, untuk kelengkapan data pun kita bisa komunikasi ke OPD terkait untuk segera melengkapi data yang kurang.
LD	Untuk aplikasinya sendiri apakah pernah eror pak?
AE2	Untuk error tidak ada, paling karena jaringan yang kurang bagus itu bikin kita kalau buka jadi lemot, dan juga kalau lagi banyak user yang login itu juga aga lemot, tapi itu tidak jadi masalah. Untuk aplikasi OM-SPAN kendalanya ada di jaringan saja.
LD	Apakah ada pelatihan untuk penggunaan aplikasi OM-SPAN ini?
AE2	Untuk laporannya, terkadang mengalami ada yang namanya temuan-temuan dan kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan maupun melengkapi data/dokumen yang kurang. Tapi ada juga yang mengalami kerugian-kerugian yang kita minta mereka untuk melakukan pengembalian sesuai dengan jumlah kerugian yang ada

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025  
 Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan  
 Pewawancara : Latiffah Dinar  
 Nama Informan : **Philipus Kehek, S.Kom**  
 Jabatan : Staf Sekretaris  
 Kode Informan : PK3  
 Kode Pewawancara : LD

Inisial	Percakapan
LD	Bagaimana tahapan proses audit yang dilakukan di Inspektorat Kab. Sorong Selatan
PK3	Untuk tahapan proses audit di Inspektorat Kab. Sorong Selatan itu, kita mengacu pada PKPT (program Kerja Pengawasan Tahunan) yang disusun oleh Subag Perencanaan dan teman-teman di bagian perencanaan, PKPT ini menjadi dasar pemeriksaan kita. Untuk prosesnya sendiri ketika anggarannya tersedia kita akan membentuk tim baik itu dari IRBAN yang bertanggung jawab maupun dari IRBAN lain yang kita rasa perlu untuk di gabungkan dalam proses audit OPD yang bersangkutan, Untuk Objek audit itu sendiri ada yang secara langsung diperintahkan oleh Bupati lisan maupun tulis, tapi ada juga program kerja kita yang memang setiap tahun kita lakukan.
LD	IRBAN itu tim yang dibentuk atau gimana pak?
PK3	IRBAN itu seperti bidang yakni (Inspektur Pembantu). Jadi ada Inspektur itu kepala Inspektorat sendiri dan juga ada IRBAN yang dibagi menjadi 4 bidang sesuai dengan wilayah atau surat tugas. Sekarang sudah ada juga IRBAN 5 atau biasa disebut IRBAN KHUSUS dia itu menangani permasalahan khusus seperti investigasi, tindak lanjut temuan-temuan dari BPK dan penanganan masalah yang sifatnya ke pengawasan eksternal dalam hal seperti kepolisian, kejaksaan.
LD	Apa Saja kegiatan kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan audit?
PK3	Untuk kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan Audit sendiri, kita disini ada yang namanya PKPT dan setiap tahunnya akan diperbaharui dengan surat keputusan Bupati dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kita, atau objek-objek pemeriksaan kita yang menjadi sasaran pemeriksaan.
LD	Apakah Inspektorat hanya mengaudit sesuai dengan PKPT pak?
PK3	Inspektorat mengaudit berdasarkan Program Kerjanya tetapi juga diperintahkan langsung oleh bupati tetapi ada juga tindak lanjut dari pemeriksaan-pemeriksaan BPK, BPKP.

LD	Untuk proses pengambilan data/dokumen yang dibutuhkan untuk proses audit bagaimana pak?
PK3	Untuk pengambilan data/dokumen, kita membuat surat permintaan dokumen yang dibutuhkan lalu dikirim ke OPD-OPD terkait yang akan diaudit.

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025  
 Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan  
 Pewawancara : Latiffah Dinar  
 Nama Informan : **Dian Budi Sukaca, A.Md. Tek**  
 Jabatan : Kasubag Perencanaan & Admin E-AUDIT  
 Kode Informan : BS4  
 Kode Pewawancara : LD

Inisial	Percakapan
LD	Disini pada tahap audit mana saja yang sudah menggunakan teknologi informasi pak?
BS4	Kita disini audit yang berbasis teknologi sebenarnya belum ada, tapi kalau untuk reviu-reviu ada, jadi pengawasnya ada audit, review, monev, berdasarkan ketentuan dari kemendagri, Audit merupakan salah satu pengawasan dan kita belum berbasis teknologi karena sekarang audit lebih banyak mengacu pada BPK, sekarang inspektorat dituntut untuk reviu. Ada disini Sistem Informasi tindak lanjut, ini ada aplikasi E-AUDIT, jadi ada SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut), SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah) ini untuk BPK punya. Kita bisa masuk di SIKAD dan SIPTL.
LD	Aplikasi SIPTL itu seperti apa pak?
BS4	Di SIPTL kita bisa meng upload semua apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi BPK, jadi kalau BPK bilang kita harus input bukti-bukti pengembalian ataupun administrasi berupa pernyataan-pernyataan, surat-surat dari kepala dinas ke bawah nya, nah itu semua kita harus input di SIPTL ini, kita scan lalu input di SIPTL setelah di verifikasi oleh BPK, setelah oke baru kita bisa input ke SIPTL ini.
LD	Yang mempunyai akses untuk menginput data/dokumen itu siapa saja pak?
BS4	Ada beberapa orang yang bisa masuk dan mempunyai user sendiri, akan tetapi itu melalui BPK dulu baru bisa dapat user untuk masuk ke aplikasi E-AUDIT ini, dan juga kebetulan di inspektorat ini saya sebagai adminnya.
LD	Apakah ada kendala pak, selama menggunakan aplikasi E-AUDIT ini?
BS4	Kalau kendalasih jaringan yaa, cuman kadang kalau data atau dokumen yang diminta oleh BPK belum sesuai yaaa kita cari data tersebut sampai akhirnya bisa diverifikasi oleh BPK.
LD	Apakah ada pelatihan untuk penggunaan aplikasi E-AUDIT ini pak?

BS4	Untuk pelatihan tidak ada, Kita hanya langsung koordinasi dengan pihak BPK lewat Whatsapp, kadang juga lewat zoom kalau melibatkan beberapa orang, jadi kalau ada kendala-kendala ya koordinasinya lewat WA itu
LD	Kendala yang pernah terjadi biasanya apa pak?
BS4	Pernah ada salah input, dokumen tidak bisa ter upload karena jaringan yang tidak stabil, tapi masih aman lahh untuk kendala-kendalanya.
LD	Setelah menggunakan sistem Informasi berbasis teknologi ini manfaat yang di dapat apa pak?
BS4	Manfaatnya ya kita tidak lagi perlu bawa dokumen banyak-banyak, kita cukup bawa laptop, terus pengecekan dokumen-dokumennya

**Lampiran 2 Daftar Kode Kategori dan Tema**

TEMA	KT	KATEGORI	KK
Identifikasi Proses Audit	K1	Dasar Pelaksanaan Audit	KS1
		Proses Pelaksanaan Audit	KS2
Pemanfaatan TI dalam Proses Audit	K2	OM-SPAN	KS3
		SIPD-RI	KS4
		E-AUDIT	KS5
Pengaruh TI dalam Proses Audit	K3	Pengaruh Teknologi Informasi	KS6
Kompetensi dan Kesiapan Auditor	K4	Kemampuan Auditor	KS7
Kendala dalam Pemanfaatan Ti	K5	Jaringan Internet tidak Stabil	KS8
		Keterlambatan Dokumen Digital dari OPD	KS9
		Audit Lapangan masih Manual	KS10
Dampak TI pada Proses Audit	K6	Meningkatkan efisiensi Kerja Auditor dan Akurasi Hasil Kerja	KS11
		Mempercepat Tindak Lanjut Temuan	KS12

**Lampiran 3 Open Coding**

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025

Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Pewawancara : Latiffah Dinar

Nama Informan : Johan Hehanussa, SE

Jabatan : IRBAN (Inspektur Pembantu) 1 & Auditor Senior

Kode Informan : JH1

Kode Pewawancara : LD

	<b>Materi Wawancara</b>	<b>Kode</b>	<b>Ide Pokok</b>
LD	Bagaimana tahapan proses audit yang dilakukan di Inspektorat Kab. Sorong Selatan?		



LD	Kalau untuk pemeriksaan dokumennya disini sudah menggunakan Teknologi Informasi belum ya pak? Seperti aplikasi atau website?		
JH1	Kalau untuk proses audit kita masih manual, kita menggunakan aplikasi hanya pada tahapan <i>review</i>		
LD	Itu menggunakan aplikasi apa pak?		
JH1	Aplikasi yang sudah disiapkan oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) masuknya pada sipd-ri.kemendagri.go.id yang hanya bisa di akses oleh pengelola internal kita disini dan itu hanya tim yang ditugaskan yang bisa akses dan tidak semua bisa masuk/login, dan juga kita hanya bisa menarik data yang kita butuhkan.		
LD	Siapa saja yang bisa masuk/akses di sipd-ri.kemendagri.go.id tersebut pak?		
JH1	Itu biasanya tim yang ditugaskan untuk melakukan audit atau biasanya yang mendapatkan tugas untuk me <i>review</i> dokumen tertentu yang akan mendapatkan akses untuk masuk di sistem tersebut.	KS9	Tidak semua auditor mendapatkan akses aplikasi
LD	Bapak sendiri pernah mendapatkan akses untuk masuk di sistem Teknologi tersebut pak?		
JH1	Saya pernah masuk, akan tetapi saya hanya membantu mengarahkan saja, dan ada tim lain yang bertanggung jawab untuk akses aplikasi tersebut.		
LD	Berarti disitu kita bisa mengupload dan mengambil data/dokumen yang kita butuhkan ya pak?		

JH1	Kalau meng <i>upload</i> data, kami tidak bisa, yang bisa meng <i>upload</i> data adalah pada bagian tim perencanaan, kita hanya mengambil dokumen/data tersebut untuk kepentingan <i>review</i> data/dokumen	KS4 KS7	Akses SIPD terbatas hanya untuk melihat data Kesiapan auditor terhadap TI belum merata
LD	Untuk pemeriksaan dokumennya bagaimana pak?		
JH1	Untuk pemeriksaan dokumennya masih manual, jadi setelah kita mengambil data di sistem/ website tersebut, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan/pemeriksaan secara manual bersama-sama dengan Tim yang sudah dibentuk.	KS2	Audit dokumen dilakukan secara fisik/manual
LD	Berarti untuk pemeriksaan dokumen/data nya masih manual ya pak, apakah ada kendala selama melakukan pemeriksaan dokumen secara manual tersebut pak?		
JH1	Kalo kendala, pasti ada. yang pertama dari sisi yang kita audit atau kita awasi, dan juga dari sisi internal kita. Kendala kita pertama, biasanya kalau melakukan pengawasan kan si surat tugas ada waktu yang telah ditentukan/dibatasi, biasanya kita melampau waktu tersebut, karena lambatnya mereka dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, sehingga pemeriksaannya melampaui waktu yang sudah ditentukan.		
LD	Untuk hasil auditnya bagaimana pak? Apakah kendala dan apakah pernah mendapatkan temuan-temuan selama melakukan proses audit?		

JH1	Untuk laporannya, terkadang mengalami ada yang namanya temuan-temuan dan kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan maupun melengkapi data/dokumen yang kurang. Tapi ada juga yang mengalami kerugian-kerugian yang kita minta mereka untuk melakukan pengembalian sesuai dengan jumlah kerugian yang ada	KS2	Hasil temuan diarahkan untuk pembinaan
LD	Apakah pernah ada pelatihan untuk pemeriksaan audit ini?		
JH1	Untuk pelatihan ada dan menjadi sebuah keharusan untuk kami APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), pelatihan itu kita lakukan setiap tahun, kita belum malakukan akan tetapi kita aparat disini pernah mengikuti pelatihan tersebut yang diselenggarakan oleh BPK, dan juga kita mengirim Auditor yang ada disini untuk mengikuti kegiatan diklat maupun pegawai-pegawai yang ada disini untuk mendukung tugas pengawasan.	KS7	Pelatihan Audit ada, tapi tida terfokus pada Teknologi Informasi

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025

Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Pewawancara : Latiffah Dinar

Nama Informan : Abdullah Ena, S.IP

Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan & Admin DAK  
(Dana Alokasi Khusus)

Kode Informan : AE2

Kode Pewawancara : LD

	<b>Materi Wawancara</b>	<b>Kode Kategori</b>	<b>Ide Pokok</b>
LD	Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) ini seperti apa ya pak? dan fungsinya untuk apa ya pak?		
AE2	Aplikasi OMSPAN BKD 2025 kementerian keuangan, saya selalu <i>review</i> DAK Fisik kemudian selalu masuk di laporan realisasi penyerapan, kita di suruh <i>review</i> karena itu salah satu syarat untuk transferan data DAK ke daerah, tidak bisa di transfer kalo kami APIP belum <i>review</i> DAK, karena itu salah satu syarat.		
LD	Data apa saja yang ada didalam web/aplikasi OM-SPAN ini pak?		

AE2	Ini kan OPD-OPD terkait pengelola dana DAK mereka kan sudah meng input, kan ada <i>user</i> masing-masing nih, <i>user</i> untuk inspektorat sendiri, untuk di keuangan ada juga <i>user</i> pemda, kesehatan, pendidikan. Nah kalau saya itu <i>user</i> untuk <i>review</i> data yang sudah di input.		
LD	Apakah bapak bisa meng <i>upload</i> data juga? atau hanya me <i>review</i> saja?		
AE2	Saya hanya mencocokkan dengan daftar kegiatan mereka yang sudah ada juga di aplikasi OM-SPAN ini, jadi saya tinggal periksa kegiatan mereka apakah sudah sesuai dengan RAB apa belum.	KS11	Memudahkan kerja auditor dan akurasi hasil kerja
LD	Untuk periksanya berti manual ya pak ya?		
AE2	Iya, sa ceknya masih manual. Tapi sekarang sudah lebih gampang, dokumen/data yang dibutuhkan sudah ada semua di dalam aplikasi OM-SPAN ini, tinggal kita cocokkan nominalnya apakah sudah sesuai dengan yang di input. Kalau sudah dan cocok, saya tinggal setuju kemudian saya cetak hasil <i>review</i> nya, itu adalah bukti bahwa laporan DAK fisik yang sudah saya <i>review</i> sudah cocok atau <i>balance</i> .	KS3	OM-SPAN memudahkan verifikasi data keuangan
LD	Apakah bapak melakukan <i>review</i> nya setiap hari?		
AE2	Tidak, saya <i>review</i> datanya tidak setiap hari, hanya ketika ada surat penugasan dari OPD terkait, itupun biasanya setiap anggaran dibagi menjadi 3 tahapan, sesuai dengan kegiatannya		
LD	Apakah dari hasil <i>review</i> yang bapak lakukan ada hasil yang mungkin belum <i>balance</i> atau kurang cocok begitu pak?		
AE2	Kalau ada dokumen atau data yang tidak cocok dengan nominalnya, kita akan tolak dan memberikan informasi kepada OPD terkait untuk melakukan		

	perbaikan.		
LD	Penggunaan Aplikasi OM-SPAN ini sudah berapa lama pak?		
AE2	Sudah lama sejak 2020 kalau ga salah ya, tapi saya mulai menjadi admin di tahun 2024, jadi saya baru satu tahun menggunakan aplikasi ini, dan sangat mempermudah sekali, kita tidak perlu mencetak banyak-banyak dokumen untuk melakukan pemeriksaan laporan. Tinggal buka aplikasi dan cek manual pada data yang sudah di upload oleh OPD terkait, dan datanya pun sudah lengkap.		
LD	Apakah ada kendala pak, selama menggunakan aplikasi OM-SPAN ini?		
AE2	Kendala yang sering kita hadapi itu ya jaringan saja, kalau lagi lelet ya kita cari lokasi dimana jaringan bagus, untuk kelengkapan data pun kita bisa komunikasi ke OPD terkait untuk segera melengkapi data yang kurang.	KS8	Kendala jaringan internet tidak stabil
LD	Untuk aplikasinya sendiri apakah pernah eror pak?		
AE2	Untuk eror tidak ada, paling karena jaringan yang kurang bagus itu bikin kita kalau buka jadi lemot, dan juga kalau lagi banyak user yang login itu juga aga lemot, tapi itu tidak jadi masalah. Untuk aplikasi OM-SPAN kendalanya ada di jaringan saja.	KS8	Kendala jaringan tidak stabil
LD	Apakah ada pelatihan untuk penggunaan aplikasi OM-SPAN ini?		
AE2	Untuk laporannya, terkadang mengalami ada yang namanya temuan-temuan dan kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan maupun melengkapi data/dokumen yang kurang. Tapi ada juga yang mengalami kerugian-kerugian yang kita minta mereka untuk melakukan pengembalian sesuai dengan jumlah kerugian yang ada	KS7	Kesiapan auditor jika mengalami adanya temuan-temuan



	maupun tulis, tapi ada juga program kerja kita yang memang setiap tahun kita lakukan.		
LD	IRBAN itu tim yang dibentuk atau gimana pak?		
PK3	IRBAN itu seperti bidang yakni (Inspektur Pembantu). Jadi ada Inspektur itu kepala Inspektorat sendiri dan juga ada IRBAN yang dibagi menjadi 4 bidang sesuai dengan wilayah atau surat tugas. Sekarang sudah ada juga IRBAN 5 atau biasa disebut IRBAN KHUSUS dia itu menangani permasalahan khusus seperti investigasi, tindak lanjut temuan-temuan dari BPK dan penanganan masalah yang sifatnya ke pengawasan eksternal dalam hal seperti kepolisian, kejaksaan.	KS12	IRBAN Khusus mempercepat tindak lanjut temuan
LD	Apa Saja kegiatan kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan audit?		
PK3	Untuk kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan Audit sendiri, kita disini ada yang namanya PKPT dan setiap tahunnya akan diperbaharui dengan surat keputusan Bupati dan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kita, atau objek-objek pemeriksaan kita yang menjadi sasaran pemeriksaan.		
LD	Apakah Inspektorat hanya mengaudit sesuai dengan PKPT pak?		
PK3	Inspektorat mengaudit berdasarkan Program Kerjanya tetapi juga diperintahkan langsung oleh bupati tetapi ada juga tindak lanjut dari pemeriksaan-pemeriksaan BPK, BPKP.		
LD	Untuk proses pengambilan data/dokumen yang dibutuhkan untuk proses audit bagaimana pak?		
PK3	Untuk pengambilan data/dokumen, kita membuat surat permintaan dokumen yang dibutuhkan lalu dikirim ke OPD-OPD terkait yang akan diaudit.	KS1	Pengumpulan data dokumen dimintai secara resmi melalui surat

**TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

Data Wawancara dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025

Lokasi Wawancara : Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan

Pewawancara : Latiffah Dinar

Nama Informan : Dian Budi Sukaca, A.Md. Tek

Jabatan : Kasubag Perencanaan & Admin E-AUDIT

Kode Informan : BS4

Kode Pewawancara : LD

Inisial	Percakapan	Kode Kategori	Ide Pokok
LD	Disini pada tahap audit mana saja yang sudah menggunakan teknologi informasi pak?		
BS4	Kita disini audit yang berbasis teknologi sebenarnya belum ada, tapi kalau untuk rewiu-rewiu ada, jadi pengawasnya ada audit, rewiuw, monev, berdasarkan ketentuan dari kemendag RI, Audit merupakan salah satu pengawasan dan kita belum berbasis teknologi karena sekarang audit lebih banyak mengacu pada BPK, sekarang inspektorat dituntut untuk rewiu. Ada disini Sistem Informasi tindak lanjut, ini ada aplikasi E-AUDIT, jadi ada SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut), SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah) ini untuk BPK punya. Kita bisa masuk di SIKAD dan SIPTL.	KS10  KS5 KS5	TI belum mendukung audit substantif  TI SIPTL digunakan untuk menyimpan bukti tindak lanjut SIKAD mendukung pencatatn kerugian daerah

LD	Aplikasi SIPTL itu seperti apa pak?		
BS4	Di SIPTL kita bisa meng upload semua apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi BPK, jadi kalau BPK bilang kita harus input bukti-bukti pengembalian ataupun administrasi berupa pernyataan-pernyataan, surat-surat dari kepala dinas ke bawah nya, nah itu semua kita harus input di SIPTL ini, kita scan lalu input di SIPTL setelah di verifikasi oleh BPK, setelah oke baru kita bisa input ke SIPTL ini.		
LD	Yang mempunyai akses untuk menginput data/dokumen itu siapa saja pak?		
BS4	Ada beberapa orang yang bisa masuk dan mempunyai user sendiri, akan tetapi itu melalui BPK dulu baru bisa dapat user untuk masuk ke aplikasi E-AUDIT ini, dan juga kebetulan di inspektorat ini saya sebagai adminnya.		
LD	Apakah ada kendala pak, selama menggunakan aplikasi E-AUDIT ini?		
BS4	Kalau kendalasih jaringan yaa, cuman kadang kalau data atau dokumen yang diminta oleh BPK belum sesuai ya kita cari data tersebut sampai akhirnya bisa di verifikasi oleh BPK.	KS8	Kendala jaringan tidak stabil
LD	Apakah ada pelatihan untuk penggunaan aplikasi E-AUDIT ini pak?		
BS4	Untuk pelatihan tidak ada, Kita hanya langsung koordinasi dengan pihak BPK lewat Whatsaap, kadang juga lewat zoom kalau melibatkan beberapa orang, jadi kalau ada kendala-kendala ya koordinasinya lewat WA itu	KS7	Minim pelatihan auditor dalam penggunaan TI
LD	Kendala yang pernah terjadi biasanya apa pak?		
BS4	Pernah ada salah input, dokumen tidak bisa ter upload karena jaringan yang tidak stabil, tapi masih aman lahh untuk kendala-kendalanya.	KS9	Kesalahan input data sering terjadi
LD	Setelah menggunakan sistem Informasi berbasis teknologi ini manfaat yang di dapat apa pak?		

BS4	Manfaatnya ya kita tidak lagi perlu bawa dokumen banyak-banyak, kita cukup bawa laptop, terus pengecekan dokumen-dokumennya	KS6	TI mempermudah mobilisasi auditor
-----	---	-----	-----------------------------------

## Lampiran 4 Axial Coding

<b>ANALISIS DATA</b>			
<b>PERAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES AUDIT DI INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN</b>			
<b>IDE POKOK/ KATA KUNCI</b>	<b>KONSEPTUALISASI</b>	<b>KATEGORISASI</b>	<b>TEMATISASI</b>
PKPT sebagai dasar audit	Audit mengacu pada perencanaan tahunan	Dasar pelaksanaan audit	Identifikasi Proses Audit
Surat tugas dan penentuan tim	Penugasan formal auditor	Mekanisme penugasan	Identifikasi Proses Audit
Permintaan dokumen OPD	Pengumpulan dokumen fisik/digital	Pengumpulan data awal	Identifikasi Proses Audit
Audit dokumen masih manual	Pemeriksaan fisik belum terdigitalisasi	Audit substantif manual	Identifikasi Proses Audit
Upload bukti di SIPTL	Penggunaan TI untuk tindak lanjut	Implementasi TI pada tindak lanjut	Pemanfaatan TI dalam audit
SIKAD mencatat kerugian	Digitalisasi data kerugian daerah	Implementasi TI pada pelaporan kerugian	Pemanfaatan TI dalam audit
OM-SPAN menyediakan data lengkap	Data keuangan tersedia dalam sistem pusat	TI sebagai sumber verifikasi	Pemanfaatan TI dalam audit
SIPD hanya untuk akses data	Keterbatasan peran TI untuk auditor	Akses TI terbatas	Pemanfaatan TI dalam audit

Audit fisik belum berbasis TI	TI belum menggantikan pemeriksaan lapangan	TI tidak mendukung audit substantif	Pemanfaatan TI dalam audit
Tidak perlu bawa dokumen banyak	TI menghemat tenaga dan waktu	Efisiensi kerja auditor	Pengaruh TI terhadap Efektivitas Audit
Data tersedia lengkap	TI mempercepat verifikasi	Kecepatan proses audit	Pengaruh TI terhadap Efektivitas Audit
Data tidak cocok → ditolak	TI meningkatkan ketelitian	Akurasi hasil audit	Pengaruh TI terhadap Efektivitas Audit
Hasil review langsung dicetak	TI mempercepat penyusunan laporan	Efisiensi output audit	Pengaruh TI terhadap Efektivitas Audit
Minim pelatihan TI	Kurangnya peningkatan kapasitas pengguna	Hambatan SDM	Kompetensi Auditor
Pelatihan umum APIP	Pelatihan tidak spesifik aplikasi TI	Pelatihan tidak merata	Kompetensi & kesiapan TI
Belajar mandiri	Inisiatif auditor memahami aplikasi	Adaptasi mandiri	Kesiapan Auditor
Akses TI tidak merata	Penguasaan TI tidak seimbang	Kesiapan TI rendah	Kesiapan organisasi
Jaringan sering gagal	Infrastruktur TI tidak stabil	Hambatan teknis	Kendala TI
Aplikasi lemot	Sistem tidak optimal saat digunakan	Kendala sistem	Hambatan operasional
Dokumen OPD terlambat	Faktor eksternal menghambat auditor	Ketidaksiapan mitra	Hambatan proses audit
Human error input	Kesalahan pengguna	Hambatan SDM	Hambatan TI

SIKAD menyimpan rekod kerugian	TI menciptakan audit trail	Akuntabilitas meningkat	Dampak TI pada audit
SIPTL menyimpan bukti tindak lanjut	Akses transparan terhadap bukti	Transparansi audit	Peningkatan akuntabilitas
Data lengkap mempermudah audit	TI meningkatkan kualitas pemeriksaan	Kinerja auditor meningkat	Dampak TI
Output audit lebih cepat	TI mempercepat penyusunan laporan	Efisiensi dan kinerja	Dampak TI

## Lampiran 5 PKPT Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan



**BUPATI SORONG SELATAN**  
**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN**

**NOMOR : 700/158/BS5/IV/2023**

**TENTANG**  
**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**BUPATI SORONG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung capaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Kabupaten Sorong Selatan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan pengawasan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan pedoman pada peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sorong Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 907);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi

Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang - undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil tentang Aparatur Sipil Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman umum penanganan benturan kepentingan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 00 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2003;
19. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 00 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;
20. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 900/35/BSS/III/ Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam **Disusun**  
KESATU dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan terhadap Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Inspektorat  
Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Teminabuan  
Pada Tanggal : 14 Meret 2025

**BUPATI SORONNG SELATAN**

**PETRONELLA KRENAK, S.Sos**

**Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara**

